

# BISNIS SOSIAL (SOCIAL BUSINESS) UNTUK PEMBANGUNAN INKLUSIF

(Analisis Teori dan Penerapan dengan Studi Kasus di Jawa Timur)

SULIKAH ASMOROWATI, S.Sos, MDevst, Ph.D  
DIAN YULIE REINDRAWATI, S.Sos, MM, Ph.D

# **BISNIS SOSIAL (*SOCIAL BUSINESS*) UNTUK PEMBANGUNAN INKLUSIF**

---

*(Analisis Teori dan Penerapan dengan Studi Kasus di  
Jawa Timur)*

**Sulikah Asmorowati, S.Sos, MDevSt, Ph.D**

**Dian Yulie Reindrawati, S.Sos, MM, Ph.D**

## TENTANG PENULIS



Sulikah Asmorowati lahir di Surabaya 16 Mei 1975 adalah staf pengajar, sekaligus Kepala Departemen Administrasi/Koordinator Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara (IAN), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. Penulis menyelesaikan Program S1-nya di almamater tercinta, yaitu Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UNAIR. Sesuai dengan tuntutan pengembangan program studi, dimana salah satu konsentrasi dalam Prodi S1 IAN FISIP UNAIR adalah Manajemen Pembangunan; Program S2 dan S3 penulis diperoleh dari *Development Studies Program*, The University of Melbourne, Australia. Penulis banyak melakukan penelitian dan kajian dalam bidang administrasi dan manajemen pembangunan. Beberapa topik penelitian dan karya ilmiah yang pernah dilakukan dan ditulis penulis antara lain adalah tentang kemiskinan, masalah-masalah gender, anak jalanan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan alternatif, pembangunan yang berbasis atau yang digerakkan masyarakat (*Community Driven Development*) dan pembangunan inklusif (*inclusive development*). Selain itu kajian-kajian dalam administrasi publik, seperti reformasi administrasi publik dan reformasi birokrasi juga menjadi perhatian penulis. Tulisan dan karya jurnal ilmiah penulis banyak tersedia secara online, diantara Urban Poverty and Rural Development Bias yang terindeks scopus dan beberapa tulisan lain.

## TENTANG PENULIS



Dian Yulie Reindrawati lahir di Probolinggo 7 Juli 1976 adalah staf pengajar, sekaligus Kepala Program Studi Manajemen Perhotelan dan Kepariwisataaan, Fakultas Vokasi (FV), Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. Penulis menyelesaikan Program S1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UNAIR. Setelah tamat S1, penulis melanjutkan Program S2 dan S3 di dua Universitas yang berbeda yaitu, The University of Technology Sidney Australia untuk program S2 di bidang pariwisata dan University of Newcastle Inggris unrtuk program S3 di bidang yang sama yaitu pariwisata. Penulis banyak melakukan penelitian dan kajian dalam bidang pariwisata. Beberapa topik penelitian dan karya ilmiah yang pernah dilakukan dan ditulis penulis merupakan kajian pariwisata di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Timur. Berbagai karya tulis penulis diantaranya dapat dilihat dan diakses pada Jurnal Kebudayaan dan Politik XVIII, XIX, dan XI.

Surabaya, 20 Oktober 2017

(Dian Yulie Reindrawati)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, pemilik dan penguasa semesta raya sehingga buku yang berjudul *Bisnis Sosial (Social Business) Untuk Pembangunan Inklusif (Analisis Teori dan Penerapan Pada Program Feminisasi Kemiskinan di Jawa Timur)*. Reformasi Birokrasi dan Pembangunan, *Analisis Best Practice* di Indonesia ini bisa penulis selesaikan dengan baik. Penulisan buku ini didorong oleh kurangnya kajian maupun studi yang mengkaitkan reformasi administrasi publik, khususnya reformasi birokrasi dengan pembangunan. Pembangunan inklusif saat ini telah menjadi resep ampuh dalam studi dan praktek pembangunan di dunia, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Konsep pembangunan ini mensyaratkan keterlibatan aktif seluruh elemen dan aspek pembangunan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya buku ini, terutama 'the Anggika', penulis menyampaikan Terimakasih yang tak terhingga. Selain itu, disadari atau tidak, isi maupun penyajian dan tampilan buku ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan untuk perbaikan penulisan buku ini ke depan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat membawa manfaat optimal bagi pembacanya, yatu para akademisi, praktisi, maupun mahasiswa yang menekuni Ilmu Administrasi Negara atau Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berminat dalam masalah-masalah administrasi pembangunan (*development administration*) dan pembangunan masyarakat (*community development*).

Surabaya, 10 Oktober 2017

(Sulikah Asmorowati dan Dian Yulie Reindrawati)

# DAFTAR ISI

<b><u>BAB I PENDAHULUAN</u></b>	<b>1</b>
1. MENGAPA BISNIS SOSIAL	4
2. MENGAPA PEMBANGUNAN INKLUSIF	6
3. BISNIS SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN INKLUSIF	8
<b><u>BAB II KONSEP <i>SOCIAL BUSINESS</i></u></b>	<b>15</b>
1. PENGERTIAN BISNIS SOSIAL	15
2. KARAKTERISTIK BISNIS SOSIAL SEBAGAI <i>SOCIAL ENTREPRENEURSHIP</i>	18
3. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN INOVASI BISNIS SOSIAL DENGAN INOVASI MODEL BISNIS	25
4. KERANGKA MODEL SOSIAL BISNIS	27
5. PRINSIP BISNIS SOSIAL OLEH MUHAMMAD YUNUS	29
6. BUSINESS MODEL CANVAS UNTUK BISNIS SOSIAL	29
<b><u>BAB III PEMBANGUNAN &amp; PEMBANGUNAN INKLUSIF</u></b>	<b>31</b>
1. MAKNA PEMBANGUNAN – AWAL KEMUNCULANNYA HINGGA SAAT INI	31
2. AKTOR DALAM PEMBANGUNAN	37
3. PENDEKATAN UNTUK PEMBANGUNAN	39
4. SDG'S DAN INCLUSIVE DEVELOPMENT	43
5. POSISI PEMBANGUNAN INKLUSIF	51
6. CIRI-CIRI PEMBANGUNAN INKLUSIF	52
7. PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN INKLUSIF	53
8. INCLUSIVE DEVELOPMENT DI INDONESIA	55
<b><u>BAB IV FEMINISASI KEMISKINAN</u></b>	<b>57</b>
1. GENDER & DEVELOPMENT	57
2. FEMINISASI KEMISKINAN	63

<b><u>BAB V PROGRAM PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN DI JAWA TIMUR</u></b>	<b>68</b>
1. PROGRAM PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN DI JAWA TIMUR	69
2. RUANG LINGKUP PROGRAM PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN	71
3. LOKASI PROGRAM PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN DI JAWA TIMUR	73
4. SASARAN PROGRAM PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN DI JAWA TIMUR	74
<b><u>BAB VI LESSON LEARNED PROGRAM PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN</u></b>	<b>77</b>
1. PRAKTIK <i>SOCIAL BUSINESS</i> PROGRAM PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN DI JAWA TIMUR	78
2. <i>INCLUSIVE DEVELOPMENT</i> PADA PROGRAM FEMINISASI KEMISKINAN DI JAWA TIMUR	79
3. BISNIS MODEL KANVAS PROGRAM PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN DI JAWA TIMUR	81
<b><u>DAFTAR PUSTAKA</u></b>	<b>87</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Upaya pembangunan yang telah dilakukan sejak 200 tahun yang lalu, dan mencapai puncaknya pada era perang Dunia II, telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat pembangunan ini pada awalnya hanya difokuskan dan diukur dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi (yang dihitung dengan kenaikan *Gross National product (GNP)* riil perkapita dan ukuran kuantitatif lain seperti *Gross National Income, Product Domestic Bruto (PDB)* atau *Product Domestic Regional Bruto (PDRB)*) (Esteva 1992; Remenyi 2004; Pieterse 2010; Escobar 2012).

Seiring dengan pergeseran pengertian dan fokus pembangunan yang meliputi pula aspek sosial dan aspek-aspek pembangunan lain yang bersifat multidimensional; melengkapi manfaat dalam pertumbuhan ekonomi, manfaat pembangunan kemudian mengarah kepada perbaikan standar hidup yang lebih luas, yang meliputi aspek sosial dan aspek-aspek lain yang



diukur dengan banyak indikator yang berbeda. Di antaranya adalah manfaat pembangunan yang diukur dengan *Human Development Index* (HDI atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM)), yang mengukur manfaat pembangunan dari aspek peningkatan kesehatan, pendidikan dan usia harapan hidup individu; maupun banyak indikator pengukur manfaat atau keberhasilan pembangunan yang lain, seperti *Gender Development Index* (GDI) atau indeks pembangunan gender, dan yang terbaru *Inclusive Development Index* atau indeks pembangunan inklusif), yang mengukur inklusivitas elemen-elemen pembangunan dalam pembangunan yang bersifat multidimensional (meliputi aspek sosial ekonomi dan lingkungan (WEF 2018).

Namun, dibalik berbagai manfaat dan capaian pembangunan tersebut di atas, upaya pembangunan sering dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini bersumber pada ketersediaan sumber daya yang cenderung terbatas dan sebaliknya adanya tuntutan kebutuhan, aspirasi serta target, tujuan dan sasaran pembangunan yang sifatnya tak terbatas. Karena itu upaya pembangunan sejatinya merupakan pilihan dari alternatif-alternatif kebijakan yang seharusnya ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan warga negara.

Lebih Tak jarang meninggalkan permasalahan laten pembangunan, yaitu kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan dan kesenjangan inilah yang kemudian meninggalkan sekelompok masyarakat menjadi tidak berdaya dan menjadi kelompok masyarakat marginal yang rentan terhadap

Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai halantara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan,gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan

kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya.

Pada kondisi tertentu, kemiskinan dapat disebabkan dari berbagai segi, diantaranya :

- Kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam.
- Kemiskinan buatan. Kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin.
- Sulitnya pemenuhan hak-hak dasar kehidupan manusia antara lain: makanan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan pendapat anperkapita masyarakat.
- Kesenjangan pembangunan antara kota-kota besar dipulau jawa dan kota-kota didaerah diluar pulau jawa, dan juga antara kota dengan pedesaan dan daerah terpencil lainnya yang tentunya belum terjamah pembangunan, dan juga potensi sumber daya alam yang berbeda.
- Guncangan perekonomian sebagai akibat dari lemahnya dasar perekonomian Indonesia, yang mengakibatkan banyaknya pengangguran.
- Kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan, dimana kurangnya perhatian pemerintah dalam mengikut sertakan atau memberdayakan perempuan dalam pembangunan
- Kultur dan Budaya daerah yang turut mempengaruhi.

seringkali meninggalkan ada bab ini akan disajikan uraian mengenai hal yang mendasari untuk apa kita memelajari *social business* dan pembangunan inklusif serta relevansi di antara *social business* dan pembangunan inklusif.

## 1. Mengapa Bisnis Sosial

Sejak mulai diperkenalkan oleh Muhammad Yunus pada tahun 1980an hingga dewasa ini *social business* telah menjadi salah satu bentuk pilihan intervensi kebijakan, program, proyek dan inisiatif pembangunan berbasis *grass-roots* yang populer dan efektif. Berada diantara dua sumbu organisasi (profit dan non-profit), *social business* menjadi satu pilihan yang menjanjikan untuk bisa lebih memberdayakan masyarakat, termasuk perempuan agar lebih bisa mandiri secara ekonomi maupun sosial.

Perkembangan teori *social business* dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi di Bangladesh. Masyarakat miskin di Bangladesh terjebak dalam kemiskinan dan kelaparan yang cukup parah.

**Gambar 1.1. Potret kehidupan masyarakat Bangladesh**



Ide lahirnya teori ini berasal dari seorang perempuan desa yang bernama Sufiya Begum. Demi membantu perekonomian keluarganya, ia membuat usaha dengan membuat bangku bambu yang kemudian dijual. Untuk membeli bahan bakunya, ia meminjam uang dengan bunga

tinggi dari rentenir setempat. Akan tetapi, rentenir tersebut hanya mau memberi pinjaman bila Sufiya memberi hak penuh kepada rentenir untuk membeli seluruh produk dengan harga yang telah ditentukan oleh rentenir tersebut. Dengan perjanjian yang tidak adil serta penetapan bunga yang tinggi, Sufiya hanya memperoleh pendapatan dua sen per hari. Bagi masyarakat, hal tersebut membuat semakin mustahil bagi mereka untuk terbebas dari kemiskinan. Melihat kondisi ini, Muhammad Yunus berusaha menciptakan sistem yang dapat membantu masyarakat miskin tersebut, sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan dapat hidup lebih mandiri (Yunus, 2008:50).

Usaha tersebut dimulai dengan membayarkan hutang masyarakat kepada rentenir melalui uang pribadinya. Selanjutnya, Muhammad Yunus mencoba meyakinkan bank setempat untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang miskin. Namun, bank tersebut tidak bersedia karena menganggap orang miskin tidak layak mendapatkan pinjaman. Hal ini dikarenakan orang-orang miskin tersebut tidak memiliki riwayat pinjaman dan tidak mempunyai agunan untuk ditawarkan. Selain itu, mereka juga buta huruf sehingga tidak memungkinkan untuk mengisi formulir. Keadaan tersebut bertentangan dengan peraturan bank, sehingga membuat mereka tidak *eligible* (tidak berhak) atau *non-bankable* (tidak bisa masuk dalam system perbankan).

Muhammad Yunus kemudian menawarkan dirinya sebagai jaminan bagi orang-orang miskin. Artinya, bank memberikan pinjaman kepada Muhammad Yunus dan kemudian ia membagikan pinjaman tersebut kepada orang-orang miskin. Usulan tersebut disetujui oleh bank. Setelah memberikan pinjaman kepada orang-orang miskin, ternyata mereka dapat mengembalikan pinjaman tersebut tepat waktu.

Setelah itu, pada tahun 1983 didirikan *Grameen Bank*. *Grameen* berasal dari kata 'gram' yang dalam Bahasa

Bengali berarti desa. Melalui bank ini, orang-orang miskin mendapat pinjaman tanpa agunan. Sistem yang diterapkan pada Bank Grameen berlawanan dengan sistem yang ada pada bank konvensional. Jika bank konvensional memberikan pinjaman dengan agunan, maka Grameen memberikan pinjaman tanpa agunan. Jika sasaran bank konvensional adalah masyarakat kalangan atas, maka sasaran Bank Grameen adalah masyarakat miskin.

Pada tahun 2010, Bank Grameen telah memberikan mikrokredit atau pinjaman kepada lebih dari 7,5 juta orang miskin untuk keluar dari kemiskinan. Dari jumlah tersebut, 97 persen di antaranya adalah wanita (Yunus *et al*, 2010:308-325). Sistem ini telah terbukti untuk memberdayakan masyarakat miskin terutama kaum perempuan.

Pada mulanya, *social business* lebih dianggap sebagai kegiatan yang lebih dekat dengan 'sumbangan' dan *non-profit oriented*. Akan tetapi, fenomena Grameen Bank di Bangladesh telah menggeser persepsi tersebut. Fenomena tersebut telah meyakinkan masyarakat bahwa dengan *social-business* kita tidak hanya membantu masyarakat akan tetapi dapat juga dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri.

Dengan *social business*, perlahan-lahan rakyat miskin dapat menjadikan dirinya berdaya melalui pemanfaatan kemampuan dan sumber daya disekitarnya. Dari situlah rakyat miskin mampu mencapai suatu kemandirian, tidak lagi bergantung pada pinjaman orang lain ataupun bantuan pemerintah. Dengan *social business*, maka rakyat miskin berkesempatan lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

## **2. Mengapa Pembangunan Inklusif**

Pendekatan pembangunan inklusif atau *inclusive development* saat ini telah menjadi resep ampuh atau mantra

untuk pembangunan yang efektifitas dan mensejahterakan, khususnya di Asia (Chibba, 2008). Dalam banyak negara di Asia, inklusivitas telah menjadi prioritas perencanaan pembangunan nasional. Walaupun baru mengemuka hampir satu decade terakhir, konsep pembangunan inklusis, sebenarnya telah dikenal lebih dari satu abad yang lalu, sebagaimana didokumentasikan Chiba (2008:145):

*“In a country well governed, poverty is something to be ashamed of. In a country badly governed, wealth is something to be ashamed of” (Confucius 551-479 BC)*

*“No society can surely be flourishing and happy of which by far the greater part of the numbers are poor and miserable” (Adam Smith 2007/1776)*

*“No culture can live if it attempts to be exclusive” (Mohandas Gandhi 1945)*

Kutipan Chiba ini jelas menunjukkan bahwa sejak masa Confucius (551-479 BC) hingga masa Gandhi 1945, pembangunan telah mensyarakatkan inklusivitas semua pihak. Meskipun begitu masih menurut Chiba, baru akhir-akhir ini sajapara ahli pembangunan, organisasi-organsiasi internasional, dan pemerintah-pemerintah di dunia mengakui bahwa *“the very notion of development necessitates inclusiveness”* atau bahwa pembangunan memerlukan inklusivitas.

Pembangunan inklusif merupakan suatu pendekatan pro-rakyat miskin yang secara adil menilai dan menyertakan kontribusi dari seluruh stakeholders, termasuk masyarakat marjinal, dalam mencapai tujuan pembangunan. Pendekatan ini menekankan pada transparansi dan akuntabilitas, dan meningkatkan dampak pembangunan melalui kerja sama antara masyarakat sipil, pemerintah, dan aktor publik (Oxfam, 2012).

Perkembangan pendekatan pembangunan inklusif dapat digali dari munculnya pembangunan alternative (*alternative development*) yang mengusung gerakan *participatory* dan *empowerment* masyarakat. Pendekatan-pendekatan berbasis partisipatif dan pemberdayaan masyarakat ini menunjukkan telah adanya *a consciousness* atau kesadaran bahwa tidak boleh ada *exclusion* dalam pembangunan (See Esteva 1992).

Di akhir 1960-an, era dimana aspek sosial dalam pembangunan sangat ditekankan melengkapai konsentrasi atau fokus hanya pada aspek ekonomi dalalam pembangunan, telah pula menjadi titik tolak perkembangan pendekatan pembangunan inklusif. Sejak itu, dan terutama sejak akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an hingga sekarang perspektif pembangunan selalu mensyaratkan pentingnya inklusivitas dalam pembangunan dan menjadi hal yang mutlak untuk diperjuangkan baik oleh organisasi-organisasi pemerintah, maupun organisasi non pemerintah baik lokal, nasional, maupun internasional, termasuk masyarakat sipil (*civil society*) untuk mempromosikan dan terlibat dalam pembangunan yang bersifat inklusif (Chibba 2008). Untuk Pemerintahan, LSM dan organsiasi internasional, pendekan pembangunan inklusif terefleksi dalam tujuan (*goals*), sasaran (*objectives*), kebijakan (*policies*), dan strategi, program, regulasi serta persetujuan persetujuan yang menekankan inklusivitas. Dalam sektor privat, pendekatan inklusif development banyak diusung dalam kerangka *corporate social responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan.

### **3. Bisnis Sosial untuk Pembangunan Inklusif**

Perspektif *inclusive development* atau pendekatan pembangunan inklusif menjadi suatu hal yang mutlak untuk

dilakukan. Kata 'inklusif' sendiri berarti 'tidak ada yang tidak dilibatkan' (*'inclusion' implies not excluding anyone*). Pendekatan ini telah menjadi resep untuk keberhasilan pembangunan, terutama yang berbasis pembangunan partisipatif. Dalam perspektif pembangunan inklusif, selain mensyaratkan distribusi kesejahteraan kepada segenap masyarakat, bagaimanapun kesejahteraan itu diukur; pembangunan juga mengharuskan inklusifitas semua aktor dan elemen pembangunan, termasuk elemen-elemen yang selama ini termarginalkan, seperti kelompok masyarakat miskin, perempuan dan anak-anak, penyandang cacat (difabel) dan penyandang masalah sosial lain, serta kelompok-kelompok minoritas yang lain. Singkatnya, dalam *inclusive development* manfaat pembangunan harus bisa dirasakan semua elemen dan aktor pembangunan serta dilakukan dari oleh dan untuk semua elemen dan aktor pembangunan tersebut.

Pendekatan pembangunan inklusif tak ayal menjadi pendekatan yang sangat menjanjikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, termasuk di Indonesia. Pemerintah sendiri telah menginkorporasi pendekatan pembangunan inklusif dalam berbagai kebijakan, program dan proyek pembangunan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Beberapa upaya yang dilakukan mulai dari kebijakan fiskal, subsidi, pemberian bantuan langsung, hingga kebijakan yang langsung mengarah pada *grass-root* kemiskinan seperti kebijakan pendidikan, beasiswa, peningkatan jaminan sosial dan lain sebagainya.

Selama ini, sebelum pendekatan pembangunan inklusif digalakkan di Indonesia, secara normatif program-program pengentasan kemiskinan tersebut berjalan dengan baik, namun tidak terlalu berdampak pada perubahan kondisi masyarakat miskin. Kekurangan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah



seperti yang disampaikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN2PK) terletak pada konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme *top-down*. Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan (TN2PK, n.d.). Singkatnya, upaya-upaya ini memerlukan pendekatan yang lebih bersifat *'inclusive for all'*.

Upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan program-program *Millennium Development Goals (MDGs)*, kesepakatan global untuk pembangunan negara-negara di dunia untuk periode 2000-2015 yang kemudian oleh BAPPENAS didistribusikan ke tingkat lokal melalui Rencana Aksi Daerah (RAD), namun program-program tersebut berjalan sangat lambat dan membutuhkan biaya yang cukup besar.

Berakhirnya era MDGs pada tahun 2015 yang masih belum menjawab ketertinggalan memunculkan kembali pemikiran untuk mencapai tujuan pembangunan yang bernama *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs memiliki 17 tujuan yang tertuang dalam ilustrasi berikut:

**Gambar 1.2. Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals**



Sumber: United Nation Development Programs (UNDP)

Prinsip dari SDGs menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia yaitu (1). Tidak melemahkan komitmen internasional terhadap MDGs pada tahun 2015; (2). Mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3). Fokus pada pencapaian ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan secara berimbang, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan; (4) Koheren dan terintegrasi dengan agenda pembangunan pasca-2015.

Merujuk pada prinsip tersebut, fokus pada pencapaian ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip tersebut diperlukan berbagai strategi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan salah satunya dengan ekonomi mikro berbasis pada komunitas untuk memberdayakan masyarakat miskin, khususnya di kawasan perkotaan. Strategi tersebut telah berhasil diterapkan oleh Prof. Muhamad Yunus di Bangladesh. Strategi *microfinance* yang digagas oleh Prof. Yunus bermula dari meminjamkan modal kepada sekelompok penduduk miskin khususnya perempuan untuk

dikembangkan menjadi usaha. Keberhasilan usaha tersebut mengilhami munculnya berbagai strategi pembangunan yang berbasis pada *microfinance*. Mader (2015) menyatakan bahwa dengan adanya keuangan mikro yang terlembaga dengan baik dapat menjadi alat penanganan kemiskinan yang sejalan dengan pembangunan. Terlebih alat penanggulangan kemiskinan tersebut dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat miskin kepada pemerintah (Mader, 2015).

Kecenderungan yang ada selama ini adalah masyarakat miskin memiliki ketergantungan kepada pemerintah. Hal ini tidak mengherankan mengingat pemerintah memiliki kewenangan dan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung juga dapat memberikan guncangan kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kelemahan pemerintah adalah sulitnya bergerak pada sektor mikro dan spesifik kasus dikarenakan banyaknya hambatan birokratisme dan syarat legal-formal kelembagaannya. Oleh karena itu, *Social business* muncul dengan berbagai inovasi dan kreasi terhadap jasa kemasyarakatan yang selama ini tidak tertangani oleh pemerintah tersebut.

Untuk menciptakan kemandirian tersebut serta untuk mencapai pembangunan yang lebih bersifat inklusif, penerapan *social business* atau bisnis sosial menjadi satu pilihan yang sangat tepat dan mendesak. *Social business* dapat memberikan kebermanfaatn tidak hanya pada bisnis itu sendiri namun juga memiliki efek sosial bagi masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Yunus bahwa bisnis sosial adalah suatu upaya dimana:

*“some people have tried to combine the dynamism and self-sufficiency of business with the pursuit of worthy social goalsthrough the creation of nonprofit organizations that sell*

*socially beneficial products and services*” (beberapa orang mencoba untuk mengkombinasikan dinamisasi dan kemandirian berbisnis dengan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial melalui pendirian organisasi non-profit yang menjual produk dan jasa yang bermanfaat secara sosial). (Yunus, 2007)

Berkembangnya *Social business* dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberikan nilai inovasi dan kreasi baru terhadap lingkungan sosial-ekonomi masyarakat, dapat menjadi modal sosial pembangunan nasional, dan membantu upaya peningkatan kesetaraan (*equity promotion*) dan pemerataan kesejahteraan (*spreading welfare*) kepada masyarakat luas.

Secara sosial-ekonomis, kegiatan *Social business* dapat meningkatkan kesempatan kerja di masyarakat. Hal ini dikarenakan semangat wirausaha yang menjadi basisnya, semangat untuk menciptakan lapangan pekerjaan (*to create jobs*) daripada mencari kerja (*to seek a job*). Orientasi *Social business* yang lebih diarahkan pada golongan kelas bawah dapat memberikan suatu alternatif bagi kaum tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya agar dapat lebih layak. Selanjutnya *Social business* pada akhirnya akan menjadi sebuah modal sosial yang sangat dibutuhkan dalam membangun Indonesia. Gagalnya transformasi kelembagaan selama ini telah membuat masyarakat Indonesia meninggalkan modal sosialnya dan lebih memilih menjadi masyarakat yang individualis-kapitalistis. Santosa (2007) menyatakan bahwa modal sosial merupakan bentuk yang paling penting dari berbagai modal yang dapat diciptakan oleh social entrepreneur karena dalam kemitraan ekonomi yang paling utama adalah nilai-nilai: saling pengertian (*shared value*), saling percaya (*trustworthy*) dan budaya kerjasama (*a culture of cooperation*). Apabila hal tersebut telah terbentuk maka selanjutnya maka dibangunlah sebuah

jaringan yang dapat meningkatkan akses pada pembangunan fisik, finansial, dan sumber daya manusia yang lebih luas.

Salah satu tujuan pembangunan inklusif adalah terwujudnya kesetaraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Paradigma pembangunan saat ini yang masih lebih mementingkan pertumbuhan (*pro growth*) telah menguras aset bangsa dan memindahkannya pada sekelompok orang tertentu saja. Sehingga paradigma pembangunan ini harus dapat diarahkan menjadi pembangunan yang berkeadilan, berdaulat, dan berkelanjutan. Melalui *social business* tujuan tersebut akan dapat diwujudkan, karena para pelaku bisnis yang semula hanya memikirkan pencapaian keuntungan yang maksimal, selanjutnya akan tergerak pula untuk memikirkan pemerataan pendapatan agar dapat dilakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Singkatnya, bisnis sosial berbasis pada komunitas dapat menjadi strategi alternatif bagi pemberdayaan masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan penerapan *social business*, pemberdayaan masyarakat tidak harus terprogram atau diinisiasi oleh pemerintah, namun sangat terbuka kemungkinan untuk diinisiasi dan dijalankan oleh masyarakat, sehingga memicu masyarakat yang kreatif, aktif dan inklusif. Dengan pola intervensi pembangunan seperti ini, program pemberdayaan diharapkan lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial ekonomi di masyarakat dan di level negara pada umumnya.

# **BAB II**

## **KONSEP SOCIAL BUSINESS**

Setelah mempelajari dan memahami alasan mengapa kita perlu mempelajari social business serta kaitannya dengan pembangunan inklusif di bab sebelumnya. Pada bab ini penulis menyajikan uraian mengenai makna *social business* (bisnis sosial) termasuk di dalamnya karakteristik beserta prinsip-prinsip bisnis sosial.

### **1. Pengertian Bisnis Sosial**

Dalam sistem kapitalis, terdapat dua jenis organisasi yaitu organisasi profit sebagai sarana mencari keuntungan dan organisasi nonprofit yang memiliki tujuan sosial. Bisnis sosial sebagai model dan bidang studi akademis sangat erat dengan kaitannya dengan bidang kewirausahaan sosial dan tanggung jawab social, manajemen nonprovit, dan pembangunan ekonomi global. Seperti yang diartikulasikan oleh Muhammad Yunus, model *non-loss non-dividend* adalah

unik dan sebagai "cara ketiga" antara bisnis tradisional dan amal. Model bisnis sosial Muhammad Yunus yang spesifik relatif baru, hanya ada sedikit penelitian tentang konsep tersebut. Sekarang sejumlah bisnis sosial telah beroperasi beberapa tahun.

Institut Bisnis Sosial California (CISB) bekerjasama dengan Profesor Muhammad Yunus menggagas program sosial bisnis. Program tersebut merupakan program pertama di Amerika Serikat yang melibatkan akademisi dalam penelitian di bidang akademik bisnis sosial.

*Social business* merupakan sebuah bentuk bisnis baru yang berada di antara organisasi profit dengan organisasi nonprofit. Tujuan utama *social business* adalah untuk melayani masyarakat (Yunus *et al*, 2010:308-325).

Pada dasarnya, bentuk *social business* sama dengan bentuk organisasi profit meskipun tujuan pengelolaannya tidak dimaksudkan semata-mata mencari keuntungan. *Social business* juga bukan merupakan organisasi nonprofit yang menjalankan amal. Mereka tidak mencari keuntungan untuk mereka sendiri tetapi mereka tetap berhak mendapatkan pengembalian atas uang mereka. Surplus atau *profit* yang diperoleh dari *social business* akan diteruskan kembali kepada penerima manfaat dalam bentuk harga yang lebih rendah, layanan yang lebih baik ataupun aksesibilitas yang lebih besar, bahkan memperluas akses kelompok miskin lain yang membutuhkan.

Ciri-ciri bisnis social di dunia sama namun memiliki beberapa perbedaan dalam hal focus penekanan bisnis social. Seperti di Eropa, bisnis sosial memiliki ciri berfokus pada aspek tata kelola dan bentuk kelembagaan. Sedangkan, di Amerika Serikat, penekanan pada profil wirausahawan perorangan dan kapasitasnya dalam memberikan inovasi social (Defourny dan Nyssens, 2012).

Bisnis social juga dapat kita pahami melalui cara bisnis sosial memberikan kontribusi bagi dampak social. Cara yang

pertama didasarkan pada gagasan "penyediaan produk dan/atau layanan dengan tujuan sosial khusus", sementara cara yang kedua didasarkan pada gagasan usaha "yang dimiliki" oleh warga miskin atau bagian masyarakat kurang beruntung lainnya, yang mendapat penghasilan dengan menerima dividen langsung atau manfaat tidak langsung (UNDP, 2015).

"Kita dapat memahami bahwa bisnis sosial merupakan usaha yang beroperasi di lingkungan masyarakat, sektor swasta, dan sektor-sektor publik, melalui menggabungkan ciri-ciri mana pun dari ketiga sektor tersebut."

- Penulis

Bisnis social memiliki misi social yang eksplisit. Misi tersebut menjadi cara pandang bisnis social dalam memandang dan menilai peluang bisnis. Oleh karena itu, bisnis social adalah usaha yang menggunakan perilaku kewirausahaan, praktik bisnis dan pasar sebagai alat untuk memenuhi tujuan-tujuan sosial yang eksplisit, seperti melayani kepentingan umum dan

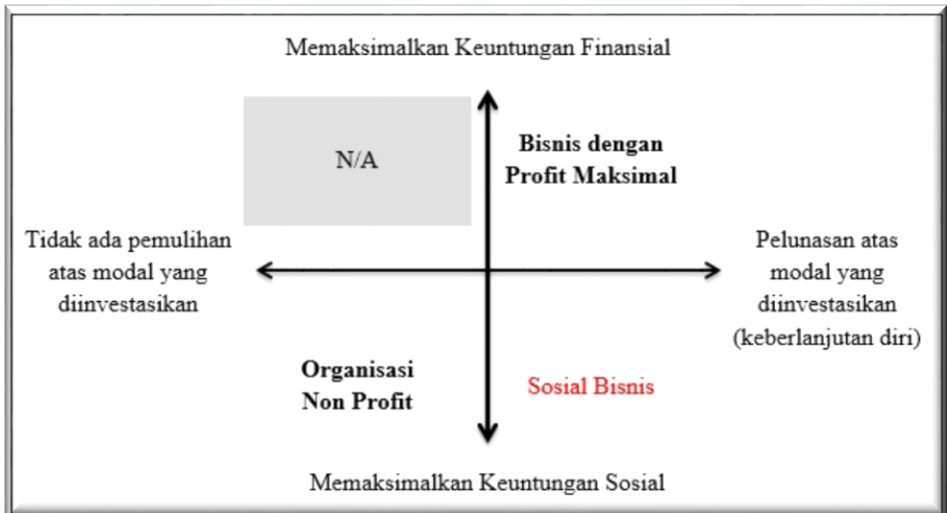
kebaikan bersama demi memberi manfaat bagi masyarakat (Defourny dan Nyssens, 2012).

Bisnis social merupakan tanggapan kebutuhan social yang kompleks dan keterbatasan pada sumber daya sehingga diperlukan inovasi bisnis untuk memberikan layanan sekaligus pemberdayaan bagi masyarakat.



## 2. Karakteristik Bisnis Sosial sebagai *Social Entrepreneurship*

**Gambar 2.1 Sosial Bisnis vs Bisnis dengan Profit Maksimal dan Organisasi Non Profit**



Sumber: Yunus et all, 2010:308-325

Berkaca pada pengalaman pembentukan Grameen Danone - yang merupakan kerjasama antara Grameen dengan Perusahaan Danone - dalam rangka penyediaan makanan bergizi dengan harga terjangkau, Yunus (2008:xvi) mengartikan *social business* sebagai berikut:

*“Bisnis sosial ialah bisnis yang tidak memberi pembagian keuntungan. Ia menjual produk dengan harga yang akan membuatnya hidup sendiri. Pemilik perusahaan dapat mengambil uang yang mereka investasikan ke perusahaan setelah selang waktu tertentu, tapi keuntungan bagi investor tak dibayar dalam bentuk bagi hasil. Namun, keuntungan tetap di dalam bisnis itu – untuk membiayai ekspansi,*

*menciptakan produk dan jasa baru, dan melakukan lebih banyak manfaat bagi dunia.”*

Dengan demikian *social business* didesain dan dijalankan sebagai usaha bisnis tapi dengan prinsip untuk mencapai tujuan sosial yang luas. Tujuan sosial ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat keluar dari jurang kemiskinan.

Bisnis social disebut sebagai salah satu bentuk *social entrepreneurship* dalam buku *The Power of Unreasonable*

Cara yang dapat dilakukan *social business* agar dapat memberikan manfaat sosial, antara lain:

- a. *Social business* yang memproduksi dan menjual produk makanan bergizi dan berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Sasaran dari produk ini adalah masyarakat miskin dan anak-anak yang kurang gizi.
- b. *Social business* yang mendesain dan menerapkan kebijakan asuransi kesehatan bagi orang miskin.
- c. *Social business* yang mengembangkan sistem energi yang dapat diperbaharui dan selanjutnya dijual dengan harga terjangkau kepada masyarakat desa yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses energi.
- d. *Social business* yang mendaur ulang sampah, limbah, dan produk buangan lain yang jika tidak diolah akan mengakibatkan polusi dan permasalahan lain.

*People* yang ditulis oleh direktur noneksekutif *Sustainability*, John Elkington dan *Managing Director* Schwab Foundation, Pamela Hartigan.

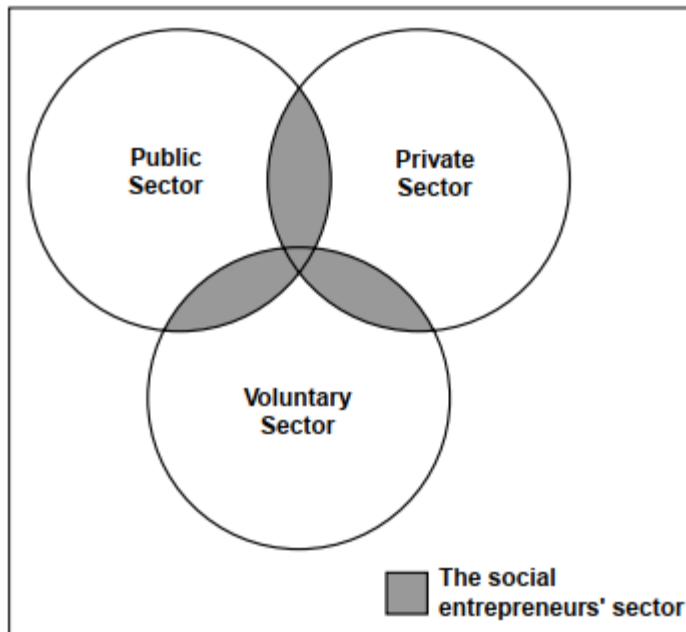
Menurut Brock and Steiner (2010), *social entrepreneurship is the creation of social impact by developing and implementing a sustainable business model which draws on innovative solutions that benefit the disadvantaged and, ultimately, society at large*. Certo dan Miller (2008) mendefinisikan *social entrepreneurship* sebagai proses yang di dalamnya melibatkan pengakuan, evaluasi dan eksploitasi berbagai kesempatan untuk menghasilkan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai social

tersebut adalah tercukupinya *basic needs* seperti ketersediaan makanan, kesehatan dan pendidikan. *Social entrepreneurship* adalah sebuah aktivitas yang menekankan pada tercapainya tujuan bersama (Steinerowski, Jack & Farmer, 2008).

Ditekankan pula bahwa *social entrepreneurship* dilakukan dalam konteks sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya (Dacin et.al, 2010). *Social entrepreneurship* ini mempromosikan solusi untuk permasalahan sosial. Lebih lanjut dikatakan bahwa *social entrepreneur* adalah orang-orang yang mengidentifikasi kegagalan dalam masyarakat dan mentransformasikannya dalam peluang bisnis, yakni dengan merekrut dan memotivasi sesama untuk memanfaatkan peluang (Thompson, 2002).

Sebagai bagian dari ekonomi sosial, *social entrepreneurship* memiliki tempat istimewa dalam usaha-usaha sosial. *Social Entrepreneurship* dalam istilah bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai kewirausahaan sosial yang merupakan penggabungan dari inisiatif sosial dan semangat kewirausahaan. Wirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar (Braun 2009). Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat (Susanto 2007). Mereka seperti seseorang yang sedang menabung dalam jangka panjang karena usaha mereka memerlukan waktu dan proses yang lama untuk dapat terlihat hasilnya (Martin & Osberg 2007).

Munculnya konsep *social entrepreneurship* tidak terlepas dari kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh tiga sektor utama dalam tata kelola negara. Hal ini dikemukakan oleh Charles Leadbeater (2001) yang menyatakan bahwa *social entrepreneur* lahir sebagai pertalian antara tiga sektor kunci (lihat gambar 1).



Pertama, adanya inovasi yang tumbuh di sektor publik, sejalan dengan perkembangan paradigma sektor publik. Hal ini mendorong para manajer publik dan pekerja sektor publik untuk menemukan cara-cara baru dalam memberikan layanan kesejahteraan kepada masyarakat. Kedua, berkembangnya minat yang lebih besar dari sektor *private* (swasta) untuk berkontribusi dalam tindakan-tindakan sosial. Hal ini mendorong praktik saling-silang kewirausahaan dari sektor swasta ke bidang kesejahteraan. Ketiga, sektor sukarela sedang mengembangkan suatu penopang inovatif yang merupakan sumber kewirausahaan sosial yang paling subur. Pengusaha sosial sering muncul dari organisasi kecil, menyebarkan keterampilan bisnis

dalam menangani pengaturan sosial. Berasal dari ketiga kekuatan ini (dijabarkan dalam Gambar 1) inovasi sosial akan muncul.

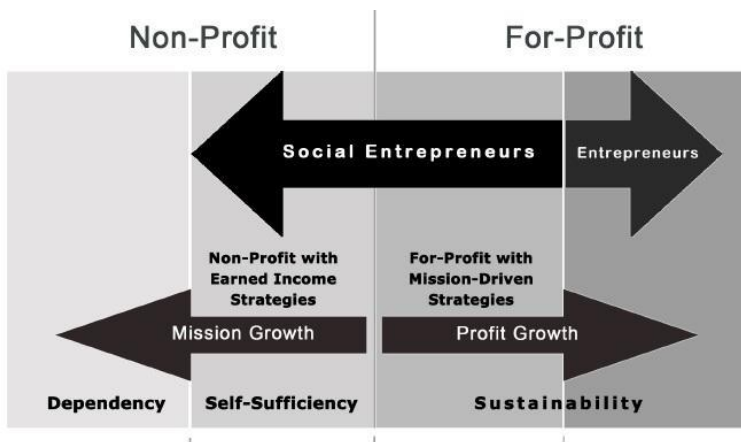
Dalam dunia akademis, *social entrepreneurship* merujuk pada beragam aktor dan aktivitas, sering dikaitkan dengan fenomena gerakan atau kelompok sosial seperti *community entrepreneurship; social change agents; Institutional entrepreneurs; Social ventures; entrepreneurial non-profit organizations; social enterprise; social innovation*. Meskipun semua fenomena ini mencakup dimensi dampak sosial, mereka berbeda secara substansial sehubungan dengan para aktor, konteks dan mekanisme yang berperan, dan teori-teori perubahan sosial. Tabel berikut menunjukkan keberagaman diskursus dan fenomena gerakan sosial kewirausahaan (Mair 2010).

Menurut Ashoka dalam Brock and Steiner (2010), sebuah usaha disebut sebagai *a social entrepreneurship* bila mengcover beberapa item berikut seperti *they change system, innovative, replicable, empower beneficiaries, scaling social impact, measurable, ultimately, and sustainable* (Ashoka dalam Brock dan Steiner (2010). Sementara itu, perbedaan utama antara *entrepreneurship* komersial (the commercial entrepreneurship) dan *social entrepreneurship* adalah dalam berwirausaha komersial, fokus utama adalah pada keuntungan/ekonomi, sementara di kewirausahaan sosial adalah *social return* adalah suatu hal yang menjadi tujuan utama. Disini terlihat bahwa yang ditekankan oleh pengusaha komersial biasa adalah ekonomi, sementara untuk pengusaha kewirausahaan sosial yang menjadi tujuan utamanya adalah usaha sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Namun, perlu juga diingat bahwa dikotomi antara entrepreneurship konvensional dan entrepreneurship sosial tidak dapat dipisahkan dalam dikotomi yang jelas (Braga et.al), misalnya alasan *social entrepreneur* berwirausaha juga

pada pemenuhan personal realisasian (Mair & Marti 2006). Lebih lanjut, banyak *scholars* yang menyatakan bahwa motivasi *social entrepreneur* adalah keinginan yang kuat untuk merubah kondisi masyarakat, ketidak nyamanan pada keadaan yang ada, dan menolong sesame (Mair & Noboa, 2005). Steinerowski elal (2008) menambahkan bahwa motivasi *social entrepreneur* adalah untuk membuat perubahan pada diri orang lain.

Abu-Saifan (2012) memberikan gambaran yang lebih luas, untuk melihat *social entrepreneurship* dalam perspektif kelembagaan. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa terdapat dua komponen utama *social entrepreneurship* yaitu *entrepreneurship* yang mengacu pada praktik-praktik kewirausahaan dan *social action* yang mengacu pada tindakan sosial. Melalui komponen tersebut dapat dilihat dengan jelas bagaimana *social entrepreneurship* berbeda dengan bisnis konvensional yang murni berorientasi pada perolehan keuntungan materi. Gambar xx menggambarkan spektrum kewirausahaan yang meletakkan dan memberikan batasan *social entrepreneurship*.



Gambar The entrepreneurship spectrum illustrating the boundaries of social entrepreneurship

Melalui gambaran spektrum tersebut, *social entrepreneurship* dapat dikelompokkan ke dalam dua tindakan organisasi, yaitu:

1. **Organisasi *non-profit* (nirlaba) dengan strategi pendapatan yang diperoleh:** perusahaan sosial yang melakukan kegiatan wirausaha sosial dan komersial hibrida untuk mencapai swasembada. Dalam skenario ini, seorang wirausahawan sosial mengoperasikan sebuah organisasi yang bersifat sosial dan komersial; pendapatan dan laba yang dihasilkan hanya digunakan untuk lebih meningkatkan penyampaian nilai-nilai sosial.
2. **Organisasi *for-profit* (bisnis murni) dengan strategi yang digerakkan oleh misi:** Bisnis dengan tujuan sosial yang melakukan kegiatan kewirausahaan sosial dan komersial secara bersamaan untuk mencapai keberlanjutan. Dalam skenario ini, seorang wirausahawan sosial mengoperasikan sebuah organisasi yang bersifat sosial dan komersial; organisasi ini mandiri secara finansial dan para pendiri dan investor dapat mengambil manfaat dari keuntungan moneter pribadi.

Kemudian, untuk memahami konsep *social entrepreneurship* dengan lebih spesifik Martin dan Osberg (2007) dalam artikel yang diterbitkan oleh *Stanford Social Innovation Review* berjudul "*Social Entrepreneurship: The Case for Definition*" berusaha lebih tepat mendefinisikan konsep tersebut dengan membandingkan dan mengkontraskan dua perbedaan penting. Pertama adalah tentang aksi yang dilakukan yaitu secara langsung (*direct action*) dan secara tidak langsung (*indirect action*). Tindakan langsung adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang aktor secara pribadi untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Tindakan tidak langsung adalah tindakan di mana aktor meyakinkan orang atau entitas lain untuk mengambil tindakan spesifik yang menghasilkan hasil yang diinginkan.

Perbedaan kedua adalah tentang hasil yang ingin dicapai yaitu: pemeliharaan atau peningkatan bertahap sistem yang telah ada dibandingkan dengan transformasi sistem yang telah ada menjadi sistem baru yang lebih optimal.

Bisnis social digerakkan oleh misi dan tujuan social untuk membantu masyarakat miskin untuk keluar dari jurang kemiskinan. Sehingga, nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang mendasarinya merupakan nilai-nilai serta prinsip-prinsip social entrepreneurship yang telah disebutkan di atas. Ini pula yang menjadikan bisnis social masuk dalam kategori *social entrepreneurship*.

### **3. Persamaan dan Perbedaan Inovasi Bisnis Sosial dengan Inovasi Model Bisnis**

Untuk dapat mengetahui perbedaan bisnis social dengan bisnis konvensional kita dapat mengetahuinya dengan melihat bagaimana system yang diterapkan oleh Bank Gramen.

Para nasabah dalam Bank Gramen bergabung dalam suatu kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari lima orang. Tujuan kelompok ini adalah memberikan dorongan, dukungan dan motivasi satu sama lain. Salah satu cara penting untuk mendukung tujuan tersebut adalah melalui Enam Belas Keputusan. Hal ini merupakan satu set komitmen pribadi dan sosial yang berkembang. Setiap anggota diharapkan belajar dan menjalankan Enam Belas Keputusan ini. Enam Belas Keputusan tersebut antara lain (Yunus, 2008:64):

1. *Empat prinsip Bank Grameen - Disiplin, Persatuan, Keberanian, dan Kerja Keras -harus dijalankan dan diutamakan dalam setiap langkah kehidupan kita.*
2. *Kita harus menyejahterakan keluarga kita.*



3. *Kita tak akan hidup di rumah bobrok. Kita harus memperbaiki dan berusaha mendirikan rumah baru sesegera mungkin.*
4. *Kita harus menanam sayuran sepanjang tahun. Kita harus makan banyak sayuran dan menjual kelebihannya.*
5. *Selama musim tanam, kita harus menanam sebanyak mungkin benih.*
6. *Kita harus merencanakan keluarga kecil. Kita harus meminimalkan pengeluaran. Kita harus merawat kesehatan.*
7. *Kita harus mendidik anak-anak dan memastikan mereka mampu membiayai pendidikan mereka.*
8. *Kita harus merawat anak-anak dan lingkungan agar selalu bersih.*
9. *Kita mesti membangun dan menggunakan WC.*
10. *Kita harus merebus air sebelum diminum atau menggunakan tawas untuk membersihkan air.*
11. *Kita tidak boleh megambil mahar (maskawin) dari pernikahan putra kita; jangan pula memberi mahar apa pun pada pernikahan putri kita. Kita harus menjaga pusat perkumpulan bebas dari kutukan mahar. Kita jangan melakukan pernikahan dini.*
12. *Kita tidak boleh menimbulkan ketidakadilan pada siapa pun; kita pun jangan pernah membiarkan siapapun melakukannya.*
13. *Untuk pendapatan lebih tinggi, kita secara kolektif harus melakukan investasi lebih besar.*
14. *Kita harus selalu siap saling membantu. Jika seseorang dalam kesulitan, kita semua harus membantu.*
15. *Jika kebetulan menemukan pelanggaran disiplin di pusat mana pun, kita semua harus ke sana dan membantu memulihkan kedisiplinan itu.*
16. *Kita harus sama-sama ambil bagian dalam semua aktivitas sosial.*

Bank Grameen kemudian berakar dalam sistem sosial masyarakat pedesaan Bangladesh. Selanjutnya, bank ini menemukan ketimpangan dan peluang ekonomi lain. Untuk menanggapi hal tersebut, ia mengembangkan diri untuk hal-hal yang lebih luas. Hingga pada tahun 2006, Grameen Group telah berkembang menjadi 24 perusahaan yang memiliki fokus perhatian sendiri-sendiri akan tetapi masih dalam satu tujuan yaitu meningkatkan kualitas hidup rakyat miskin (Yunus, 2008:86).

Inovasi model bisnis adalah upaya menghasilkan sumber-sumber keuntungan baru dengan menemukan nilai proposisi baru/nilai konstelasi kombinasi. Berikut merupakan lima hal yang dapat dipelajari dari Grameen:

#### **Kesamaan dengan inovasi model bisnis konvensional**

1. *Challenging conventional wisdom and basic assumptions* (kebijaksanaan konvensional dan dasar asumsi menantang)
2. *Finding complementary partners* (mencari mitra yang saling melengkapi)
3. *Undertaking a continuous experimentation process* (Melakukan proses eksperimentasi terus menerus)

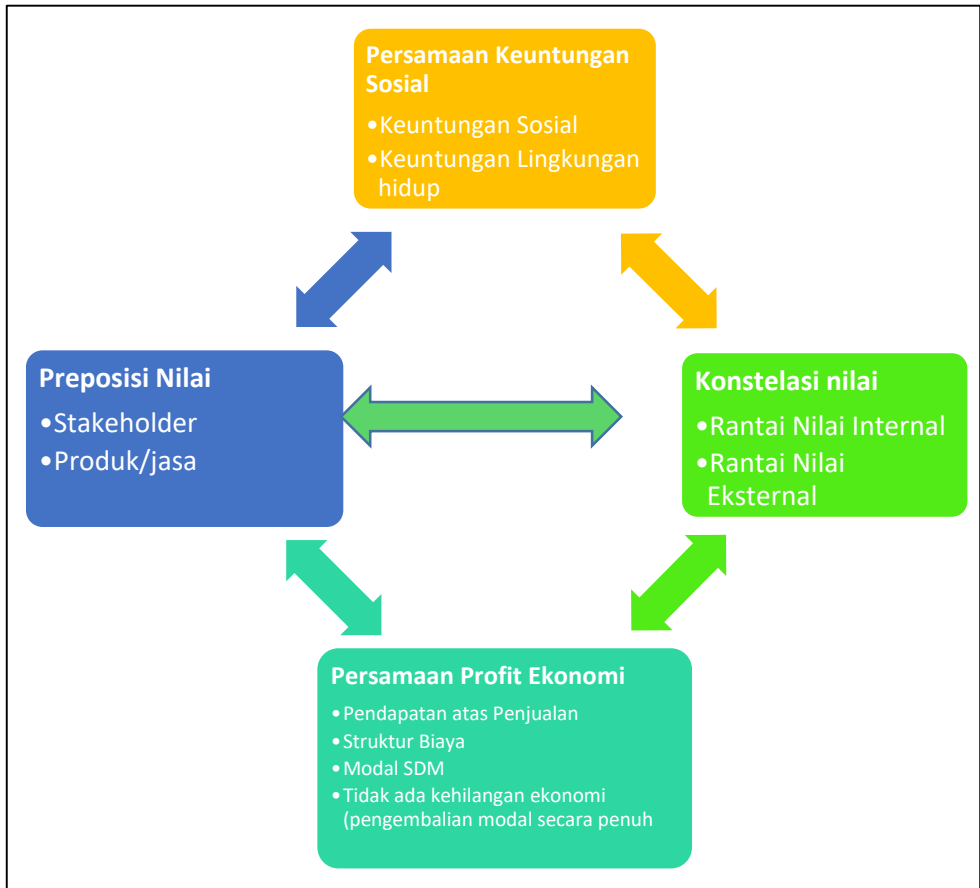
Kekhususan dari model bisnis sosial

4. *Favoring social profit-oriented shareholders* (Berpihak pada pemegang saham yang berorientasi laba sosial)
5. *Clearly specifying the social profit objective* (Jelas menentukan tujuan keuntungan sosial)

#### **4. Kerangka Model Sosial Bisnis**

Berikut adalah kerangka pengembangan atau model *social business*:

**Gambar 2.2. The Four Components of a Social Business**



**Model**

*Sumber: Yunus et al, 2010:308-325*

Perubahan model kerangka bisnis beralih dari tradisional ke *social business*. Dalam model tersebut, proposisi nilai dan konstelasi tidak hanya berfokus pada pelanggan, tetapi diperluas untuk mencakup semua pemangku kepentingan yang ditargetkan. Keuntungan sosial yang diinginkan diperoleh melalui pandangan sistem ekonomi yang komprehensif. Selanjutnya, target persamaan

keuntungan ekonomi hanya dapat dipenuhi melalui biaya dan modal, dan tidak memaksimalkan keuntungan secara materi.

## **5. Prinsip Bisnis Sosial oleh Muhammad Yunus**

Muhammad Yunus mengidentifikasi prinsip bisnis social sebagai berikut:

1. Bisnis social memiliki tujuan untuk mengatasi kemiskinan, atau masalah social lain (seperti pendidikan, kesehatan, akses teknologi, dan lingkungan) yang mengancam masyarakat dan masyarakat; bukan memaksimalkan keuntungan.
2. Keberlanjutan finansial dan ekonomi.
3. Investor mengembalikan jumlah investasinya. Tidak ada dividen yang diberikan di luar uang investasi.
4. Bila jumlah investasi dibayarkan kembali, keuntungan perusahaan tetap sama dengan perusahaan untuk ekspansi dan perbaikan.
6. sadar lingkungan.
7. Tenaga kerja mendapatkan upah pasar dengan kondisi kerja yang lebih baik.
8. Dilakukan dengan senang hati.

## **6. Business Model Canvas untuk Bisnis Sosial**

Alexander Osterwalder (2010) menciptakan Business Model Canvas untuk menjadikan konsep bisnis yang rumit menjadi lebih sederhana. Model tersebut dapat dijadikan pedoman bagi pengusaha atau perusahaan dalam memulai dan melakukan kegiatan bisnis secara efektif dan efisien.

Business Model Canvas ini berguna untuk segala jenis bisnis termasuk bisnis social, dengan menggunakan model ini maka bisnis social dapat diajalkan secara sistematis.

Bentuknya sederhana dan tidak rumit, sehingga tidak memerlukan pemahaman tingkat tinggi. Terdapat sembilan elemen yang menjadi factor utama yang diidentifikasi apabila kita menjalankan sebuah bisnis, yaitu :

- a. *Customer segments*, yaitu objek yang diidentifikasi sebagai konsumen produk/jasa.
- b. *Value propositions*, yaitu nilai yang diterapkan pada produk/jasa, ini menjadikan mengapa produk/jasa yang kita hasilkan berbeda dengan yang lain.
- c. *Channels*, yaitu media dalam menyalurkan produk/jasa juga termasuk media promosi dan penjualan.
- d. *Revenue streams*, yaitu arus pendanaan berasal dari mana, apakah hanya berasal dari profit atau sumber lain. Ini perlu untuk mengantisipasi pengeluaran tak terduga.
- e. *Customer relationship*, yaitu melalui media apa kita dapat terhubung dengan customer atau konsumen.
- f. *Key resources*, yaitu sumber daya utama yang menjadi penyokong bisnis, contohnya, apabila kita bergerak di bidang fashion maka designer merupakan key resources
- g. *Key partnership*, dalam menjalankan bisnis kita memerlukan pihak lain untuk membantu baik dalam hal produksi maupun distribusi atau penjualan. Ini yang disebut sebagai mitra kunci.
- h. *Cost structure*, yaitu sistem pembiayaan, uang atau dana yang dimiliki untuk dibelanjakan atau dianggarkan untuk apa.

# **BAB II**

## **PEMBANGUNAN &**

### **PEMBANGUNAN INKLUSIF**

Pada bab ini akan dijelaskan uraian perkembangan teori pembangunan, sejak awal mula kemunculan teori pembangunan hingga saat ini, berbagai actor yang terlibat dalam pembangunan serta kemunculan pembangunan inklusif.

#### **1. Makna Pembangunan - Awal kemunculannya hingga saat ini**

Makna pembangunan memiliki makna yang berbeda seiring dengan perkembangan zaman. Istilah pembangunan berawal dari era pasca perang, dimana pada saat itu muncul ide atau gagasan pembangunan modern. Kebijakan pembangunan sudah

digunakan pada era tersebut meskipun istilah “pembangunan” yang sebenarnya belum digunakan. Oleh karena itu, Kurt Martin (1991 dalam Pieterse, 2010: 5) berpendapat bahwa para ekonom politik klasik, Ricardo hingga Marx, adalah pemikir pembangunan karena membahas pembangunan ekonomi.

Era industrialisasi di Eropa tengah dan timur telah menimbulkan pertanyaan tentang dasar pembangunan seperti bagaimana menghubungkan antara sector pertanian dan industri. Pada saat itu, Uni Soviet menemukan instrument untuk mencapai industrialisasi. Selama perang dingin masih terjadi kapitalisme dan komunisme berlomba-lomba mengembangkan strategi pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, makna “pembangunan” adalah negara-negara berkembang berusaha untuk mengejar negara maju melalui penerapan berbagai strategi yang ditawarkan.

Cowen dan Shenton memberikan makna pembangunan yang lainnya. Di Inggris, "pembangunan" pada abad kesembilan belas, mengacu pada solusi untuk kekurangan dan kecenderungan untuk kemajuan. Hal tersebut melibatkan pemikiran tentang pertanyaan seperti populasi (menurut Malthus), kehilangan pekerjaan (untuk Luddite), pertanyaan sosial (menurut Marx dan lain-lain) dan kemelaratan kota. Dalam argumen ini, *progress* dan pembangunan (yang sering dipandang sebagai upaya yang mulus) kontras, dan pembangunan berbeda dari *progress*. Sejalan dengan ini, Hegel mengatakan bahwa *progress* linier dan pembangunan kurvilinear (Cowen dan Shenton 1996: 130). Dengan demikian, pemikiran tentang pembangunan pada abad kedua puluh di Eropa dan koloni merupakan reaksi terhadap *progress* dan kegagalan kebijakan abad kesembilan belas, di mana industrialisasi membuat orang-orang terpuruk dan tidak bekerja, dan rusaknya hubungan sosial.

Pembangunan ekonomi diawali dengan adanya ekonomi kolonial. Ekonomi kolonial dan dependensi Eropa telah mengalami beberapa tahap. Ini merupakan tahap awal

perdagangan oleh perusahaan sewaan, diikuti oleh perkebunan dan pertambangan. Pada tahap selanjutnya, kolonialisme mengambil bentuk perwalian, pengelolaan ekonomi kolonial tidak hanya dengan maksud untuk mengeksploitasi negara metropolitan mereka, tetapi juga diduga dengan memperhatikan kepentingan penduduk asli. Pembangunan, jika istilah itu digunakan sama sekali, pada intinya mengacu pada pengelolaan sumber daya kolonial, yang pertama membuat biaya koloni efektif dan kemudian membangun sumber daya ekonomi dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan nasional.

Industrialisasi bukan bagian dari ekonomi kolonial karena keunggulan komparatif koloni tersebut merupakan ekspor bahan baku untuk industri di negara-negara metropolitan. Memang ada banyak kejadian yang didokumentasikan dengan baik saat kepentingan Eropa atau kolonial menghancurkan produsen asli (seperti manufaktur tekstil di India adalah kasus klasik) atau upaya industrialisasi yang disabotase (seperti di Mesir, Turki dan Persia). Ini adalah perbedaan yang signifikan antara ekonomi kolonial dan kaum *latecomer* di Eropa tengah dan timur.

**Tabel 3.1. Makna Pembangunan dari waktu ke waktu**

Periode	Perspektif	Makna Pembangunan
1800-an	Ekonomi Politik Klasik	Memperbaiki <i>progress</i> , untuk mengejar <i>progress</i> (kemajuan)
1870>	<i>Latecomers</i>	Mengejar industrialisasi
1850>	Ekonomi Kolonial	Manajemen sumber daya, perwalian
1940>	Pembangunan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi
1950>	Teori Modernisasi	Modernisasi pertumbuhan, politik, dan social
1960>	Teori Dependensi	Akumulasi – Nasional, autosentris



<b>1970&gt;</b>	Pembangunan alternatif	Pembangunan manusia
<b>1980&gt;</b>	Pembangunan Manusia	Peningkatan kapasitas, memperluas pilihan rakyat
<b>1980&gt;</b>	Neoliberalisme	Pertumbuhan ekonomi-reformasi structural, deregulasi, liberalisasi, privatisasi
<b>1990&gt;</b>	<i>Post-Development</i>	Rekayasa otoriter, sebuah bencana
<b>2000&gt;</b>	Millenium Development Goals	Reformasi structural
<b>2015&gt;</b>	Suistainable Development Goals	Pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memperoleh kebutuhan

Dalam pemikiran modern dan ekonomi pembangunan, makna inti pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, seperti teori pertumbuhan dan teori Big Push. Pemikiran tentang proses mekanisasi waktu dan industrialisasi menjadi bagian dari hal ini, seperti dalam Rostow's Stages of Economic Growth (1960). Ketika pemikiran pembangunan diperluas untuk mencakup modernisasi, pertumbuhan ekonomi dikombinasikan dengan modernisasi politik, yaitu pembangunan bangsa, dan modernisasi sosial seperti membina kewiraswastaan dan 'orientasi pencapaian'.

Dalam teori ketergantungan, makna inti pembangunan juga adalah pertumbuhan ekonomi atau akumulasi modal. Bentuknya yang terdistorsi adalah akumulasi ketergantungan yang menyebabkan 'pembangunan keterbelakangan', dan bentuk perantara adalah 'pembangunan ketergantungan terkait'. Tujuan positifnya

adalah akumulasi nasional (atau pembangunan *autocentric*). Pemikiran pembangunan alternatif memperkenalkan pemahaman baru tentang pembangunan yang berfokus pada pengembangan sosial dan masyarakat dan pembangunan manusia (Friedmann 1992). Dengan pembangunan manusia pada pertengahan tahun 1980an, muncul pemahaman pembangunan sebagai kapasitas (meningkatkan kemampuan/kapasitas), mengikuti karya Amartya Sen mengenai kapasitas dan hak. Dalam pandangan ini, titik pembangunan, di atas segalanya, adalah memungkinkan. Definisi utama pembangunan dalam Laporan Pembangunan Manusia UNDP adalah 'memperluas pilihan rakyat'.

Dua perspektif yang berbeda secara radikal dalam pembangunan muncul pada waktu yang sama. Neoliberalisme, dalam mengembalikan ekonomi neoklasik, menghilangkan fondasi ekonomi pembangunan: gagasan bahwa negara berkembang merupakan 'kasus khusus'. Menurut pandangan neoliberal, tidak ada kasus khusus. Yang penting adalah 'mendapatkan harga yang benar' dan membiarkan kekuatan pasar melakukan pekerjaannya. Pembangunan dalam arti intervensi pemerintah adalah anatisme, karena itu berarti distorsi pasar. Tujuan utama, pertumbuhan ekonomi, dicapai melalui deregulasi, liberalisasi, privatisasi - yaitu mengembalikan fungsi utama pemerintah dan mengurangi intervensi yang mendistorsi pasar dan pada dasarnya membatalkan 'pembangunan'. Dengan kata lain, ini mempertahankan salah satu makna inti konvensional 'pembangunan', pertumbuhan ekonomi, sementara 'bagaimana' dan agensi pembangunan beralih dari satu negara ke pasar lainnya. Dengan demikian, neoliberalisme adalah perspektif anti-pembangunan, bukan dalam hal tujuan tetapi dalam hal sarana.

Pemikiran pasca-pembangunan (*post-development*) juga menempatkan sebuah posisi anti pembangunan. Ini masih

lebih radikal karena tidak hanya berlaku untuk sarana (negara dituduh melakukan rekayasa otoriter) tetapi juga pada tujuan (pertumbuhan ekonomi ditolak) dan hasilnya (yang dianggap sebagai kegagalan atau bencana bagi sebagian besar penduduk) (Rahnema dan Bawtree, 1997)

Dengan demikian, makna pembangunan cukup beragam seiring dengan perkembangan zaman. Ini termasuk penerapan sains dan teknologi pada organisasi kolektif, juga pengelolaan perubahan yang timbul dari penerapan teknologi. Hampir sejak awal pembangunan mencakup unsur reflektivitas. Ini berkisar dari pekerjaan infrastruktur (jalan, kereta api, bendungan, pelabuhan) hingga kebijakan industri, kesejahteraan negara, kebijakan ekonomi baru, ekonomi kolonial dan manajemen permintaan Keynesian.

Ada beberapa cara untuk memahami pergeseran makna pembangunan dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah melihat arkeologi wacana pembangunan sebagai dekonstruksi pembangunan dan sebagai bagian dari kritik pembangunan. Yang lain yaitu dengan memperlakukan pembangunan sebagai bagian dari konteks historis: cukup masuk akal bagi pembangunan untuk mengubah makna dalam kaitannya dengan perubahan keadaan dan kepekaan.

'Pembangunan' kemudian berfungsi sebagai cermin dari perubahan kapasitas ekonomi dan sosial, prioritas dan pilihan. Pilihan ketiga adalah menggabungkan kembali berbagai pandangan ini sebagai dimensi pembangunan, yaitu menyesuaikan bersama sebagai bagian dari perkembangan mosaik dan merekonstruksi pembangunan sebagai komponen sintesis atau perubahan (Martinussen, 1997).

Keterbatasan perspektif pembangunan adalah bahwa dibutuhkan sejarah pembangunan. Kita mempertimbangkan setiap teori sebagai hasil dari pembangunan, gambaran total dari perspektif tertentu, maka serangkaian teori berturut-turut menawarkan pandangan kaleidoskopik ke dalam

sebuah cermin kolektif. Bagaimanapun, makna pembangunan berbeda kaitannya dengan perubahan hubungan kekuasaan dan hegemoni, yang merupakan bagian dari pandangan di cermin kolektif.

## 2. Aktor dalam Pembangunan

Berbagai pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya melibatkan berbagai aktor, dengan penekanan bergeser ditempatkan pada aktor-aktor ini tergantung pada pendekatan mana yang diadopsi. Tingkat agensi yang dimiliki aktor-aktor ini akan terpengaruh oleh interpretasi tertentu tentang kekuasaan atau distribusi. Baik secara individual atau kelompok mampu membuat keputusan dan melakukan sesuatu berdasarkan pilihan mereka sendiri. Yang ekstrem adalah apabila tidak memiliki agensi, berarti tidak ada kehendak bebas dan perilaku individu dikendalikan oleh aktor lain. Ada sejumlah aktor yang terlibat dalam pembangunan. Mereka bervariasi dari individu ke organisasi global berskala besar sebagai berikut: (Kattie Willis, 2005)

**Tabel 3.2 Aktor dalam Pembangunan**

<b>Aktor</b>	<b>Aktivitas</b>
<b>Individu</b>	<b>Bergantung pada pendapatan, kelas, jenis kelamin, etnisitas, usia dan variabel sosial lainnya, dapat memiliki banyak pilihan dan pengaruh, atau ditinggalkan dengan agen yang sangat kecil.</b>

<p><b>Rumah tangga</b></p>	<p>Kelompok orang yang hidup bersama dan berbagi biaya. tidak selalu anggota keluarga yang sama, dapat beroperasi sebagai unit untuk memastikan agar semua anggota keluarga memenuhi kebutuhan dasar mereka</p>
<p><b>Komunitas</b></p>	<p>kelompok orang dengan kepentingan bersama dalam beberapa pengertian; biasanya berdasarkan lokasi tempat tinggal bersama, misalnya, sebuah desa atau daerah perkotaan, namun bisa juga merujuk pada sebuah komunitas berdasarkan identitas sosial bersama yang beroperasi</p>
<p><b>Pemerintah</b></p>	<p>beroperasi pada skala dari pemerintah daerah (kota/kabupaten, provinsi) sampai pemerintah nasional; Yang penting dalam menetapkan kerangka ekonomi dapat menjadi intervensionis, atau memainkan peran regulasi dalam pembangunan</p>

<b>Organisasi non-pemerintah (NGOs)</b>	organisasi yang tidak dijalankan oleh pemerintah dan juga bukan perusahaan pembuat keuntungan; dapat membantu masyarakat setempat menyiapkan proyek atau program untuk menyediakan layanan, menciptakan peluang menghasilkan pendapatan, atau memperbaiki hubungan sosial: bisa menjadi organisasi berskala kecil, atau sangat besar secara global.
<b>Perusahaan privat</b>	Representasi pasar; bisa jadi bisnis yang sangat kecil atau korporasi global
<b>Organisasi multilateral</b>	Dapat menetapkan agenda global untuk kebijakan ekonomi; mempromosikan perdamaian global; sumber bantuan dan bantuan teknis yang penting. Contoh: Dana Moneter Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia

### 3. Pendekatan untuk Pembangunan

Penulis akan menguraikan beberapa pendekatan yang penulis tuangkan dalam Tabel 3.3 yang berisi kronologi pendekatan dan pemahaman pembangunan. Tabel 3.3 tidak untuk menunjukkan bahwa teori-teori pembangunan telah

berkembang unilinear tanpa kontestasi atau konflik. Sebaliknya, beberapa pendekatan menunjukkan, banyak ide tentang "pembangunan" dapat hidup berdampingan, Meskipun beberapa teori diadopsi secara luas, sebagian menganjurkan atau didukung oleh actor lebih kuat.

Tabel hanya mencakup pengembangan teori pada periode setelah perang dunia kedua. Bukan karena tidak ada ide tentang sosial dan ekonomi pembangunan sebelum itu, tapi karena di tahun 1940-an dan 1950-an terjadi peningkatan diskusi internasional diskusi tentang bagaimana 'pembangunan', terutama di kawasan selatan. Organisasi internasional didirikan untuk mencoba dan mencapai pembangunan dan mengadopsi sejumlah strategi. Seperti yang dapat kita ketahui, banyak ide tentang pembangunan di paruh kedua abad kedua puluh dan mulai dari dua puluh pertama memiliki akar teori di abad kesembilan belas dan sebelumnya.

Salah satu fitur kronologis pendekatan yang harus disorot adalah sebuah konsep "kebuntuan" teori pembangunan (Schuurman, 1993). Pada tahun 1980-an, ide dari sebuah kebuntuan menjadi semakin umum. Di tahun 1960-an dan 1970-an yang kontras pendekatan teori modernisasi dan teori ketergantungan teori yang memiliki pandangan perspektif yang berbeda tentang pembangunan. Namun, masalah ekonomi global dari tahun 1980-an dan kesadaran bahwa dalam banyak indera terdapat teori "pembangunan" teori belum diterjemahkan menjadi praktik keberhasilan, mengarahkan teori untuk berhenti dan berpikir tentang apa itu pembangunan dan bagaimana bisa dicapai. Sementara Neo-liberal mendominasi pengembangan pembuatan kebijakan pasca-1980-an periode telah dikaitkan dengan sebuah pengakuan jauh lebih besar dari keragaman konsep pembangunan. Hhal ini termasuk kesadaran yang lebih besar dari kepedulian lingkungan, kesetaraan gender, dan pendekatan *grassroots*.

**Tabel 3.3 Pendekatan Utama dalam Pembangunan**

Dekade	Pendekatan Utama dalam Pembangunan
1950an	Teori modernisasi: semua negara harus mengikuti model Eropa teori strukturalis: negara-negara Selatan diperlukan untuk membatasi interaksi dengan ekonomi global untuk memungkinkan untuk pertumbuhan ekonomi domestic.
1960an	Teori modernisasi. Teori dependensi: negara-negara selatan miskin karena eksploitasi oleh negara-negara Utara.
1970an	Teori dependensi. Teori pendekatan kebutuhan dasar: fokus pemerintah dan bantuan kebijakan pada penyediaan untuk kebutuhan dasar termiskin di dunia. Teori Neomalthusian : perlu untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi, penggunaan sumber daya dan pertumbuhan penduduk untuk menghindari bencana ekonomi dan bencana ekologis Perempuan dan pembangunan: pengakuan dari cara-cara di mana pengembangan diferensiasi efek pada perempuan dan laki-laki.
1980an	Neoliberalisme: Fokus pada pasar, pemerintah harus mundur dari keterlibatan langsung dalam kegiatan ekonomi. Pendekatan <i>grassroots</i> : pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dan kearifan local.



	<p>Pembangunan berkelanjutan: perlu untuk menyeimbangkan kebutuhan generasi sekarang terhadap lingkungan dan keprihatinan pada populasi masa depan.</p> <p><i>Gender</i> dan pembangunan: kesadaran yang lebih besar dari cara-cara di mana gender terlibat dalam pembangunan.</p>
1990an	<p>Neoliberalisme.</p> <p><i>Post-development</i>: ide tentang "pembangunan" merupakan bentuk kolonialisme dan eurocentrism. Harus menantang dari <i>grassroots</i>.</p> <p><i>Sustainable development</i> (Pembangunan Berkelanjutan)</p> <p><i>Culture and development</i> (Budaya dan Pembangunan): peningkatan kesadaran tentang bagaimana sosial yang berbeda dan kelompok budaya dipengaruhi oleh proses pembangunan.</p>
2000an	<p>Neo-liberalisme: meningkatkan keterlibatan konsep globalisasi</p> <p>Pembangunan berkelanjutan</p> <p>Post-development</p> <p>Pendekatan <i>grassroots</i></p>

## 4. SDG's dan Inclusive Development



### Kotak 3.1. Sustainable Development Goals

September 2015, 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ditetapkan sebagai agenda pembangunan untuk lima belas tahun yang akan datang hingga 2030 oleh para pemimpin dunia pada konferensi PBB. Selama lima belas tahun ke depan, dengan sasaran baru yang berlaku secara universal untuk semua negara, negara-negara berusaha untuk mengakhiri semua bentuk kemiskinan, melawan ketidaksetaraan dan mengatasi perubahan iklim, dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal.

SDGs, yang juga dikenal sebagai Global Goals, membangun kesuksesan Millenium Development Goals (MDGs) dan bertujuan untuk melangkah lebih jauh untuk mengakhiri semua bentuk kemiskinan. Sasaran baru itu unik karena mereka menyerukan tindakan oleh semua negara, miskin, kaya dan berpenghasilan menengah untuk mempromosikan kemakmuran sekaligus melindungi planet ini. Mereka menyadari bahwa mengakhiri kemiskinan harus berjalan seiring dengan strategi yang membangun pertumbuhan ekonomi dan menangani berbagai kebutuhan sosial termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kesempatan kerja, sambil menangani perubahan iklim dan perlindungan lingkungan.

Meskipun SDG tidak mengikat secara hukum, pemerintah diharapkan mengambil tanggung jawab dan membangun kerangka kerja nasional untuk pencapaian 17 Sasaran. Negara-negara memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan tindak lanjut dan meninjau kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan sasaran, yang memerlukan pengumpulan data yang berkualitas, dapat diakses dan tepat waktu. Tindak lanjut dan tinjauan regional akan didasarkan pada analisis tingkat nasional dan berkontribusi untuk ditindaklanjuti dan ditinjau di tingkat global.

17 sasaran pembangunan berkelanjutan adalah :

1. Tanpa kemiskinan
2. Tanpa kelaparan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Air bersih dan sanitasi layak
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi dan infrastruktur
10. Berkurangnya kesenjangan
11. Kota dan komunitas berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13. Penanganan perubahan iklim
14. Ekosistem laut
15. Ekosistem daratan
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Sumber: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>

Dalam kotak 3.1 tersebut, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang sedang diusahakan untuk diwujudkan oleh negara-negara di dunia. Untuk mencapai keseluruhan tujuan SDG's tersebut diperlukan kerjasama oleh seluruh actor dalam pembangunan. Pada tujuan ke-17 disebutkan bahwa kemitraan untuk mencapai tujuan. Hal ini menegaskan bahwa memang tujuan ke-17 ini menjadi katalisator untuk mencapai enam belas tujuan lainnya. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang melibatkan seluruh pihak (kemitraan) untuk mencapai tujuan SDG's diperlukan, pendekatan tersebut disebut dengan *inclusive development*.

Sejak masa Confucius (551-479 BC) hingga masa Gandhi 1945, pembangunan telah mensyarakatkan inklusivitas semua pihak. Meskipun begitu, menurut Chiba, akhir-akhir ini para ahli pembangunan, organisasi-organisasi internasional, dan pemerintah-pemerintah di dunia mengakui bahwa *“the very notion of development necessitates inclusiveness”* atau pembangunan memerlukan inklusivitas. Selain itu, perkembangan pendekatan pembangunan inklusif dapat digali dari munculnya pembangunan alternative (*alternative development*) yang mengusung gerakan *participatory* dan *empowerment* masyarakat.

Pendekatan pembangunan inklusif atau *inclusive development* saat ini telah menjadi resep ampuh atau mantra untuk pembangunan yang efektifitas dan mensejahterakan, khususnya di Asia (Chibba 2008). Dalam banyak negara di Asia, inklusivitas telah menjadi prioritas perencanaan pembangunan nasional. Walaupun baru mengemuka hamper satu decade terakhir, konsep pembangunan inklusif, sebenarnya telah dikenal lebih dari satu abad yang lalu, sebagaimana didokumentasikan Chiba (2008:145):

*In a country well governed, poverty is something to be ashamed of. In a country badly governed, wealth is something to be ashamed of (Confucius 551-479 BC)*

*No society can surely be flourishing and happy of which by far the greater part of the numbers are poor and miserable (Adam Smith 2007/1776)*

*No culture can live if it attempts to be exclusive (Mohandas Gandhi 1945)*

Kutipan Chiba ini jelas menunjukkan bahwa sejak masa Confucius (551-479 BC) hingga masa Gandhi 1945, pembangunan telah mensyarakatkan inklusivitas semua pihak. Meskipun begitu masih menurut Chiba, baru akhir-akhir ini sajapara ahli pembangunan, organisasi-organisasi

internasional, dan pemerintah-pemerintah di dunia mengakui bahwa *“the very notion of development necessitates inclusiveness”* atau bahwa pembangunan memerlukan inklusivitas. Selain itu, perkembangan pendekatan pembangunan inklusif dapat digali dari munculnya pembangunan alternative (*alternative development*) yang mengusung gerakan *participatory* dan *empowerment* masyarakat. Pendekatan-pendekatan berbasis partisipatif dan pemberdayaan masyarakat ini menunjukkan telah adanya *a consciousness* atau kesadaran bahwa tidak boleh ada *exclusion* dalam pembangunan (See Esteva 1992). Selain itu di akhir 1960-an, era dimana aspek sosial dalam pembangunan sangat ditekankan melengkapai konsentrasi atau fokus hanya pada aspek ekonomi dalalam pembangunan, telah pula menjadi titik tolak perkembangan pendekatan pembangunan inklusif. Sejak itu, dan terutama sejak akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an hingga sekarang perspektif pembangunan selalu mensyaratkan pentingnya inklusivitas dalam pembangunan dan menjadi hal yang mutlak untuk diperjuangkan baik oleh organisasi-organisasi pemerintah, maupun organisasi non pemerintah baik lokal, nasional, maupun internasional, termasuk masyarakat sipil (*civil society*) untuk mempromosikan dan terlibat dalam pembangunan yang bersifat inklusif (Chibba 2008). Untuk Pemerintahan, LSM dan organsiasi internasional, pendekan pembangunan inklusif terefleksi dalam tujuan (*goals*), sasaran (*objectives*), kebijakan (*policies*), dan strategi, program, regulasi serta persetujuan persetujuan yang menekankan inklusivitas. Dalam sektor privat, pendekatan inklusif development banyak diusung dalam kerangka *corporate social responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Pendekatan-pendekatan berbasis partisipatif dan pemberdayaan masyarakat ini menunjukkan telah adanya *a*

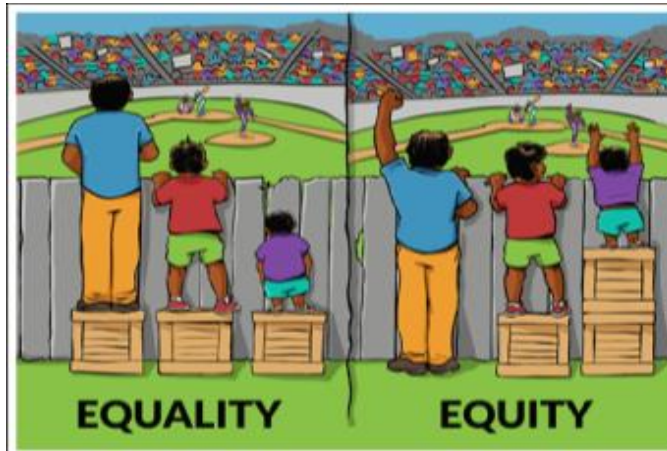
*consciousness* atau kesadaran bahwa tidak boleh ada *exclusion* dalam pembangunan (See Esteva 1992). Selain itu di akhir 1960-an, era dimana aspek sosial dalam pembangunan sangat ditekankan melengkapi konsentrasi atau fokus hanya pada aspek ekonomi dalalam pembangunan, telah pula menjadi titik tolak perkembangan pendekatan pembangunan inklusif. Sejak itu, dan terutama sejak akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an hingga sekarang perspektif pembangunan selalu mensyaratkan pentingnya inklusivitas dalam pembangunan dan menjadi hal yang mutlak untuk diperjuangkan baik oleh organisasi-organisasi pemerintah, maupun organisasi non pemerintah baik lokal, nasional, maupun internasional, termasuk masyarakat sipil (*civil society*) untuk mempromosikan dan terlibat dalam pembangunan yang bersifat inklusif (Chibba 2008).

Untuk Pemerintahan, LSM dan organsiasi internasional, pendekan pembangunan inklusif terefleksi dalam tujuan (*goals*), sasaran (*objectives*), kebijakan (*policies*), dan strategi, program, regulasi serta persetujuan persetujuan yang menekankan inklusivitas. Dalam sektor privat, pendekatan inklusif development banyak diusung dalam kerangka *corporate social responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Sebagaimana konsep-konsep ilmu sosial yang lain, pembangunan inklusif banyak didefinisikan, sehingga pengertiannya pun beragam. Secara umum pembangunan inklusif diartikan sebagai "*development that includes the needs of the poor and the excluded*" (Chibba 2008:145). Secara etimologi, "*inclusion*" berarti "*not excluding anyone*" (Indiresan 2008:241), yang berarti tidak ada seorangpun yang tidak terlibat atau inklusif. Dalam laporan *the Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development, the Commission on Growth and Development*, inklusivitas adalah suatu konsep yang meliputi equity

(keadilan) dan equality (kesamarataan) kesempatan (The World Bank, 2008). Gambar dibawah ini menggambarkan secara jelas konsep equity and equality:

**Gambar 3.1. Keadilan/Equity dan Kesamarataan/Equality**



Sumber: [http://culturalorganizing.org/wpcontent/uploads/2016/10/IISC\\_EqualityEquity.jpg](http://culturalorganizing.org/wpcontent/uploads/2016/10/IISC_EqualityEquity.jpg)

Menurut Kanbur and Rauniyar, istilah ‘inklusif’ merujuk pada “distribusi kesejahteraan dalam masyarakat, bagaimanapun kesejahteraan itu diukur” (2010:438-439). Sedangkan menurut Mahadevia (2001:254), inklusif bermakna pengikutsertaan semua warga negara (*all citizens*) dan semua dimensi dan aspek pembangunan (lihat juga Arora and Arora 2012:118). Lebih jelas lagi dalam studinya tentang pembangunan perkotaan di India, Mahadevia (2001) menyatakan bahwa pendekatan yang berkelanjutan untuk kota (*sustainable cities*) di negara-negara selatan atau negara berkembang harus bersifat inklusif. Strategi inklusif untuk pembangunan kota yang sustainable menurutnya adalah “*placing the vision of the poor and marginalised urban sector at the centre of urban policy making*”, while also “*including all the dimensions of*

*development in an holistic and synergetic manner (2001:242, 254)."*

Senada dengan pendapat tersebut, Mosiane (2011:38) mendeskripsikan *inclusive development* sebagai pembangunan yang berfokus pada kemanfaatan pembangunan bagi kelompok masyarakat yang kurang sejahtera dan marginal ("less well-off and marginalised resident"). Pendapat Rauniyar and Kanbur (2010: 456), juga tidak berbeda. Menurut mereka, dalam pendekatan pembangunan inklusif, buah dan manfaat pembangunan harus sampai dan bisa dirasakan oleh kelompok miskin dan kelompok marjinal lain, khususnya, perempuan dan anak-anak, kelompok minoritas, kelompok sangat miskin di perdesaan dan mereka-mereka yang rentan miskin yang terancam kembali dibawah garis kemiskinan jika terjadi bencana atau akibat suami atau laki-laki.

Dalam studi terkini tentang *Sustainable Human Development* (SHD) di India, Arora dan Arora (2012) berpendapat bahwa tanpa strategi-strategi inklusif, SHD bersifat parsial. Inklusifitas seperti ini bertujuan untuk memaksimalkan pencapaian pembangunan manusia, dengan kerusakan seminimal mungkin terhadap lingkungan alam dan sosial, pencapaian itu harus bisa di share atau dibagi kepada semua warga negara tanpa memandang identitas, selama warga tersebut ikut menyumbangkan pemikiran, kapasitas, bakat, dan berniat baik (Arora and Arora, 2012:118). Ilmuwan lain, Indiresan mendefinisikan pembangunan sebagai berikut:

*Suatu mekanisme dan sistem pembangunan dimana ada distribusi kesejahteraan yang adil bagi semua warga negara (kaya atau miskin), antar semua penduduk (peresaan maupun perkotaan), dan semua daerah (maju maupun kurang maju) (2008:244).*



Dari berbagai uraian tentang pengertian pembangunan inklusif diatas, terlihat jelas bahwa ada kecenderungan pengasosiasian pembangunan inklusif hanya terbatas pada penginklusan anggota masyarakat dan/atau warga negara yang kurang berdaya (*the powerless*) dan termarginalkan (*marginalised*), terutama penduduk miskin. Kecenderungan ini diakui oleh Kanbur and Rauniyar (2010:439), yang menyatakan bahwa istilah 'inklusivitas' dalam suatu tingkat tertentu telah terperangkap dalam diskursus kemiskinan.

Dalam mendefinisikan pembangunan inklusif, penulis lebih memilih untuk mengadopsi perspektif yang lebih luas dibanding hanya pengikutsertaan kelompok miskin atau yang termarginalkan. Perspektif ini dijelaskan oleh Arora dan Arora (2012:119) yang mendefinisikan pembangunan inklusif dalam konteks studi *governance*. yaitu:

Inklusivitas adalah suatu proses pembangunan social, dimana masyarakat harus bisa menjadi kelompok sasaran sekaligus contributor, secara tak terbatas pertumbuhan ekonomi adalah untuk, dari, dan oleh masyarakat bagaimanapun cara dan kapanpun waktunya; dalam konteks ini, kohesi dan integrasi sosial, serta pemberdayaan terjadi melalui suatu struktur tata pemerintahan atau *governance* yang terinstitusionalisasi.

Dengan definisi dari Arora dan Arora ini, maka pendekatan pembangunan inklusif membuka ruang bagi berbagai aktor pembangunan dan actor governance. Aktor-aktor ini terdiri dari:

- 1) aktor negara (the state atau pemerintah berikut staf nya (birokrasi),
- 2) sektor privat, dan
- 3) masyarakat sipil atau civil society.

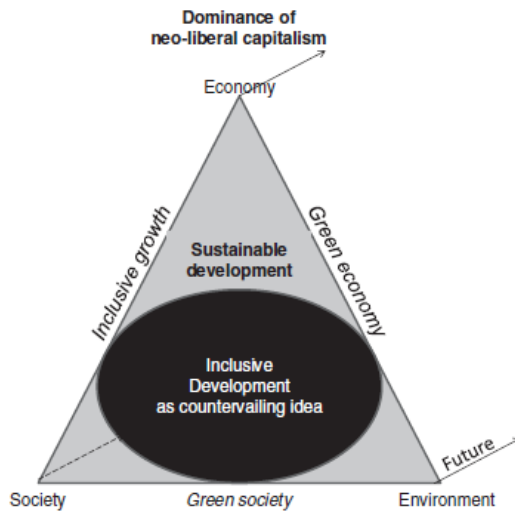
Dalam pendekatan ini semua actor berkolaborasi dan bermitra dalam kerangka kerja sistem governance.

## 5. Posisi Pembangunan Inklusif

Fokus utama pembangunan inklusif awalnya hanya pada aspek-aspek sosial yang kemudian diperluas lagi menjadi aspek sosial dan lingkungan. Hal itu karena beberapa peneliti pembangunan seperti Zoomers (2010), Fairhead et al. (2012), dan Leach et al. (2012) berpendapat bahwa pembangunan inklusif memiliki komponen ekologi yang kuat seperti masyarakat termiskin yang seringkali bergantung pada sumber daya lokal dan rentan terhadap tanah, air, dan ikan (dalam Gupta et al. 2015).

Namun, resesi global telah diperburuk oleh *trend* politik dalam mengadopsi *trade-off* yang lebih berfokus pada pertumbuhan dan pekerjaan daripada lingkungan dan inklusif. Hal tersebut menjadi penyebab munculnya konsep *green economy* dan *green growth* yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam batas lingkungan. Konsep-konsep ini sesuai dengan teori ekologi modernisasi yang berdasarkan pendekatan neo-liberal dimana mengabaikan komponen sosial dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan inklusif merupakan aspek sosial dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan (Gupta et al, 2015).

### ***Gambar 3.2. Posisi Pembangunan Inklusif***



Sumber: Gupta et al. (2015)

## 6. Ciri-ciri Pembangunan Inklusif

Pembangunan inklusif memiliki ciri-ciri seperti yang dipaparkan oleh Prasentyatoko et al. (2012: 4) sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi adalah sasaran utama, tetapi bukan menjadi tujuan pembangunan
- b. Pertumbuhan ekonomi sebagai sarana dalam mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, baik gender antara feminin atau maskulin, maupun kaya atau miskin.
- c. Pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik memiliki fungsi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- d. Kebijakan dan institusi sosial non-ekonomi berada pada derajat yang sama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, institusi jaminan sosial, tata pemerintahan/kualitas pemerintah memiliki kedudukan yang sama dalam kebijakan ekonomi (moneter dan fiskal)

Prasentyatoko et al. (2012) juga membedakan pembangunan inklusif dengan pendekatan pembangunan

neo-liberal dan sosial demokratik yang tertuang dalam table di bawah ini:

**Tabel 3.4 Perbedaan Pembangunan Inklusif dengan Pendekatan Lain**

Variabel/Faktor	Neoliberal	Sosial Demokratik	Pembangunan Inklusif
<b>Pertumbuhan</b>	Tujuan	Sarana	Sarana
<b>Peran pasar</b>	Utama	Penting	Penting
<b>Peran negara</b>	Minimal	Penting	Penting
<b>Strategi mengatasi kemiskinan dan ketimpangan</b>	Pasif	Aktif	Proaktif
<b>Titik solidaritas</b>	Pasar	Negara	Negara & masyarakat

Sumber: Prasentyoko et al. (2012)

## 7. Prinsip-prinsip Pembangunan Inklusif

Pembangunan inklusif atau *inclusive development* memiliki prinsip-prinsip. Gupta et al (2015) dalam jurnalnya yang berjudul “*Sustainable Development Goals and Inclusive Development*” membagi prinsip-prinsip pembangunan inklusif dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

### a. Pembangunan inklusif per se (secara harfiah)

Per se dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai “dengan sendirinya”. Prinsip per se yang dimaksud merupakan “tak ada yang tertinggal”, artinya, pembangunan harus dapat memberikan manfaat secara adil bagi seluruh kalangan masyarakat Terdapat lima prinsip kunci dalam pembangunan inklusif per se, yaitu:

- Memberikan peluang bagi seluruh masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembangunan
- Meliputi pengetahuan tentang seluruh hal yang berkaitan dengan proses pembangunan

- Terlibat pada pembangunan dalam segala bidang (politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan proses budaya pemerintahan)
- Meningkatkan kapasitas yang ditargetkan untuk dapat meningkatkan peluang dalam proses keterlibatan.
- Meningkatkan perlindungan masyarakat yang marginal dan memastikan bahwa mereka tidak kehilangan akses publik dan akses untuk mengelola sumber daya alam (hutan, tanah, air, ikan, dan sumber-sumber lainnya).

b. Pembangunan inklusif dalam konteks Anthropocene

Pembangunan inklusif dalam konteks Anthropocene memahami kebutuhan untuk mengadopsi standar ekosentris dan berbagi *ecospace* (ruang ekologi) secara adil dan rata kepada masyarakat dan negara maupun masa sekarang dan masa depan. Hal itu berarti pembangunan harus ikut bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan. Terdapat lima kondisi pembangunan inklusif dalam konteks Anthropocene, yaitu:

- Mengadopsi *multiple set* dalam batas ekosentris untuk mempertahankan kapasitas regeneratif bumi secara keseluruhan
- Memastikan bahwa hak-hak, tanggung jawab, dan risiko yang terkait dengan batas ekosentris dibagi secara adil untuk masyarakat dan negara maupun untuk masa sekarang dan masa depan
- Membangun ketahanan masyarakat dan kapasitas adaptif untuk semua, termasuk yang terpinggirkan
- Bekerjasama dengan lembaga atau korporasi yang diperlukan (investasi dan lembaga bantuan pembangunan)
- Mengikutsertakan semua *stakeholder* dan menciptakan pendekatan holistik melalui langkah-langkah interdisipliner dalam pengumpulan dan pertukaran informasi.

c. Pembangunan inklusif dari perspektif relasional

Indikator pembangunan inklusif tidak hanya berfokus pada populasi yang terpinggirkan, namun juga pada reformasi politik, sosial, struktur ekonomi, dan dinamika, termasuk hubungan antara kelompok-kelompok yang menyebabkan marginalisasi. Terdapat lima implikasi pembangunan inklusif dari perspektif relasional, yaitu:

- Memastikan aturan hukum dan konstitusionalisme sehingga tidak ada seorang pun yang posisinya di atas hukum (kebal hukum)
- Memastikan bahwa barang publik tidak diprivatisasi melalui keistimewaan akses
- Membahas kelompok miskin dan kelompok terpinggirkan (termasuk wanita) serta hubungan yang mereka miliki dengan kelompok kaya dan kelompok yang berkuasa
- Fokus tidak hanya pada sektor kecil, tetapi juga hubungan antara berbagai *stakeholders*
- Memastikan bahwa semua proses produksi dan pelayanan pajak dapat menghasilkan pendapatan yang diperlukan untuk komunitas global dan dibagikan secara merata

## 8. Inclusive Development di Indonesia

Pembangunan inklusif di Indonesia dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Sebagai studi kasus, seperti yang termuat dalam Jurnal *Inclusive Development of Urban Water Services in Jakarta: The Role of Groundwater* tahun penerbitan 2016 dalam Habitat International karya Michelle Kooy, Carolin Tina Walter dan Indrawan Prabaharyaka.

Dikatakan dalam jurnal tersebut bahwa penerapan konsep pembangunan inklusif terhadap layanan air perkotaan menawarkan kesempatan untuk

mempertimbangkan hubungan antara kesinambungan ekologis dan kesetaraan akses air.

Jurnal tersebut menunjukkan bahwa penerapan konsep pembangunan yang inklusif untuk melihat hubungan antara keberlanjutan ekologi dan pemerataan akses ke pelayanan air perkotaan di Jakarta, peran air tanah dalam mempengaruhi ekuitas dan keberlanjutan layanan perkotaan telah diabaikan. Ada dua factor penyebab kesenjangan. Pertama, melalui analisis pemerataan akses terhadap air di Jakarta (mengabaikan akses terhadap air tanah), akses terhadap kualitas pasokan air yang didapat belum adil. Kedua, hubungan antara ekologi degradasi sistem air tanah dan pemerataan akses ke pipa air telah diabaikan. Akibatnya, orang-orang yang mampu lebih memilih dari jaringan pipa dan yang tidak hanya bisa mengandalkan pasokan pribadi air tanah.

Untuk mencapai pembangunan inklusif layanan air kota di Jakarta membutuhkan perhatian pemerataan akses ke layanan dari berbagai jenis penyedia, dan untuk sumber yang berbeda. Tidak diragukan lagi peran penyediaan melalui sistem pipa terpusat penting. Namun, demikian juga air yang beredar di luar jaringan formal.

Untuk konsep pembangunan inklusif dan untuk pelaksanaan SDGs, hasil penelitian jurnal menunjukkan bahwa tujuan sosial kaitannya dengan akses air membutuhkan lebih perhatian terhadap kondisi ekologis. Penulis menyarankan untuk meningkatkan baik keadilan akses, dan layanan air perkotaan harus lebih inklusif.

Pendekatan pembangunan harus membangun vitalitas dan keanekaragaman pelayanan air perkotaan Jakarta. Pembuat kebijakan, aktivis, dan akademisi perlu memperhatikan heterogenitas layanan air perkotaan di luar dan atau bersama jaringan pipa terpusat diuntuk membuat akses yang lebih adil dan lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan.

# **BAB IV**

## **FEMINISASI KEMISKINAN**

Pada bab IV ini akan di uraikan mengenai pendekatan *gender & development* serta kaitannya dengan feminisasi kemiskinan. Isu gender menjadi perbincangan setelah pendekatan modernisasi tidak mampu untuk mengatasi permasalahan social yang timbul akibat adanya jarak antara populasi pria dan wanita.

### **1. Gender & Development**

Pendekatan modernisasi terhadap pembangunan tidak memiliki hubungan dengan perbedaan gender dalam populasi. Asumsinya adalah saat pertumbuhan ekonomi terjadi, keberlanjutan "pembangunan" akan semakin sedikit



memberikan keuntungan pada seluruh sektor masyarakat. Struktur yang telah terbentuk justru menciptakan dan memperburuk ketidaksetaraan dan berarti bahwa *trickle down effect* tidak benar-benar ada dan berdampak.

Salah satu aturan yang dibuat dan terstruktur secara bersama disusun oleh masyarakat adalah gender. Gender mengidentifikasi kategori pria dan wanita, tidak seperti halnya karakteristik biologis, karakteristik gender berkaitan dengan norma-norma dan ekspektasi perilaku yang terkait dengan pria dan wanita secara khusus pada waktu tertentu. Gender dapat dibangun dan memberikan kategori antara pria dan wanita sesuai dengan kegiatan sosial yang ada dan berkembang. Perubahan dari waktu ke waktu dan ruang juga menyebabkan berkembangnya kategorisasi gender dalam proses pembangunan.

Ester Boserup (1989-1970) adalah orang pertama yang fokus pada cara perempuan yang terkena dampak berbeda pada proyek modernisasi. Dia berpendapat bahwa masyarakat dan ekonomi berpindah dari pedesaan, subsistensi dasar untuk industri adalah inti perkotaan, wanita semakin dikecualikan, meninggalkan para wanita di pinggiran pembangunan kapitalis dan manfaat pembangunan kapitalis. Hal tersebut dikarenakan asosiasi wanita fokus dengan pekerjaan domestik dan reproduksi di bidang perawatan anak dan pekerjaan rumah tangga, sementara peran pria dalam masyarakat dibangun pada aktivitas nondomestik. Ketika produksi terkonsentrasi di rumah dan tanah milik bersama, wanita bisa menggabungkan dua peran, tapi setelah produksi dipindahkan ke berbagai bidang pabrik dan lokakarya, wanita tidak dapat terlibat dalam kedua kegiatan. Analisis Boserup ini telah menerima banyak kritik, setidaknya untuk generalisasi (Beneria dan Sen, 1981), karyanya adalah kunci untuk menyoroiti bagaimana sebenarnya proses

pembangunan “netral” telah sangat berbeda memberikan pengaruh pada jenis kelamin yang berbeda.

Peningkatan kesadaran gender menyebabkan organisasi pembangunan dan pemerintah menerapkan kebijakan diharapkan akan melibatkan perempuan lebih besar dan meningkatkan derajat perempuan dalam pembangunan. Sebagai contoh, Perserikatan bangsa-bangsa menyatakan 1975-1985 adalah decade PBB bagi perempuan. Inisiatif ini mengakui bahwa pembangunan yang mengecualikan perempuan tidak bisa disebut pembangunan, tetapi dalam banyak kasus, pendekatan tidak benar-benar mengatasi akar permasalahan kesenjangan dan kerugian gender atau melibatkan perempuan dalam membuat keputusan untuk kehidupannya.

Moser (1993) mengidentifikasi lima pendekatan utama yang dengan *gender & development*. Ia menekankan bahwa beberapa kategori tumpang tindih dan deskripsi kronologis tidak mengartikan bahwa pendekatan diikuti satu sama lain dengan cara yang jelas. Kategorisasi berguna untuk memeriksa bagaimana kesadaran gender telah dimasukkan dalam pengembangan teori, atau telah memberikan kontribusi pada munculnya teori baru.

Moser membangun pada pekerjaan Maxine Molyneux (1987) tentang praktis dan strategis kepentingan gender. Kepentingan “praktis”, atau oleh Moser disebut dengan istilah kebutuhan “praktis”, merujuk pada kebutuhan perempuan harus memenuhi peran yang terkonstruksi secara sosial. Sebagai contoh, jika wanita bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, maka praktik kebutuhan gender termasuk akses terhadap air minum karena akan membantu mereka saat kegiatan sehari-hari. Sebaliknya, kebutuhan “strategis” adalah mereka yang terlibat dalam perubahan status hubungan gender. Sebagai contoh, perubahan Undang-Undang tentang perempuan untuk memiliki tanah.

Pendekatan yang berbeda akan fokus pada kombinasi praktis atau kebutuhan strategis.

**Tabel 4.1. Pendekatan untuk *Gender & Development***

<b>Pendekatan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>
Kesejahteraan	1950 dan seterusnya	Ditargetkan perempuan domestic, peran perempuan dipandang pasif; proyek ditujukan perempuan praktik kebutuhan gender, seperti bantuan pangan, saran kesehatan dan gizi.
Keadilan	1970-an	Diminta oleh PBB sebagai dekade bagi perempuan; bertujuan untuk mengatasi kebutuhan strategis gender, memberantas hambatan kemajuan perempuan di ranah publik; focus pada perubahan legislative.
Anti kemiskinan	1970-an	Perempuan memiliki status rendah disebabkan oleh kemiskinan; fokus proyek menghasilkan pendapatan bagi perempuan; tidak ada pertimbangan penindasan struktur patriarkal.
Efisiensi	1980 dan seterusnya	Fokus pada wanita sebagai saluran pembangunan, selama SAPs perempuan dibayar bekerja dan intensif pekerjaan rumah tangga

Pemberdayaan	1990 dan seterusnya	bertujuan untuk menyebabkan pergeseran hubungan gender asli secara signifikan, fokus pada proyek yang dirancang dan dijalankan oleh organisasi perempuan dari Selatan; pendekatan semakin diadopsi oleh organisasi Utara organisasi; meningkatkan fokus pada penggabungan pria ke gender dan proyek-proyek pembangunan.
--------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Sumber: Moser (1993)*

Pendekatan efisiensi Moser adalah contoh tentang bagaimana dimensi gender dimasukkan ke dalam teori pembangunan. Ini mengacu pada periode penyesuaian struktural di bawah teori perkembangan neo-liberal. Selama periode ini, semakin banyak perempuan masuk ke pekerjaan berbayar. Hubungan antara SAPs dan peningkatan gaji perempuan diperjuangkan, banyak bukti tingkat mikro menunjukkan bahwa peningkatan biaya hidup dan pengurangan dukungan negara pada periode ini memaksa wanita untuk mencari pekerjaan berbayar. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi wanita untuk mendapatkan status dan pengaruh di rumah dan masyarakat melalui akses terhadap banyak pendapatan moneter. Penelitian menunjukkan bahwa masuknya angkatan kerja dikaitkan dengan peningkatan dan masalah kesehatan, karena perempuan harus menggabungkan kedua pekerjaan tersebut. Dengan tanggung jawab domestik tetap dilakukan (Dalla 1995).

Costa Elson (1995) percaya bahwa SAP bias dalam pengembangan contoh perempuan laki-laki. Bias ini terhadap laki-laki dan perempuan belum tentu merupakan kesadaran masyarakat akan kehidupan perempuan sebagai

pembuat kebijakan. SAPs diimplementasikan di tingkat nasional dan fokus pada indikator ekonomi makro (proses ekonomi di tingkat nasional seperti belanja pemerintah dan tingkat tarif. Kebijakan seperti ini mempengaruhi kehidupan orang-orang di tingkat bawah.

Dalam istilah gender, Elson berpendapat bahwa perempuan sangat terpengaruh, biasanya bertanggung jawab atas aktivitas rumah tangga, pengurangan subsidi pangan, kenaikan harga pangan dan penurunan pendapatan rumah tangga mengharuskan wanita membuat anggaran rumah tangga mereka yang terbatas melangkah lebih jauh. Hal ini menyebabkan perempuan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbelanja barang murah, menghasilkan makanan atau pakaian di rumah, bukan daripada membeli makanan siap saji atau pakaian buatan pabrik.

Selain itu, pembuat kebijakan sering berasumsi bahwa wanita yang tidak bekerja berbayar tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, mudah bagi wanita untuk "mengatasi ketegangan" dan masuk ke dalam angkatan kerja. Hal ini tidak mengenal kenyataan bahwa banyak wanita, khususnya di wilayah negara-negara selatan global, pekerjaan rumah tangga secara fisik menuntut dan memakan waktu, memasuki pekerjaan berbayar dengan adil menambah beban perempuan (Vickers 1991).

Menurut Engels (1940 [1884]), dalam *The Origin of Family Private Property & State*, karena masyarakat berpindah dari bentuk pra-kapitalis ke kapitalisme, pembagian kerja gender menjadi lebih jelas, dengan perempuan tinggal di rumah dan berurusan dengan tugas domestik, sedangkan pria yang melakukan pekerjaan berbayar di luar rumah. Ini sama dengan argumen Boserup yang diuraikan sebelumnya. Namun, argumen Engels lebih menekankan dengan kuat bahwa kapitalisme dan patriarki saling terkait erat. Dengan wanita yang bekerja di rumah,

menyediakan makanan, tempat berteduh, pakaian dan perawatan anak, pengusaha harus memberikan layanan ini untuk pekerjanya. Dalam istilah Marxis, ini disebut reproduksi tenaga kerja. Setelah analisis ini, kesetaraan gender tidak dilakukan. Agar kesetaraan gender dapat tercapai, kapitalisme perlu diganti.

Pemerintahan sosialis dan komunis cenderung mempromosikan gender, paling tidak dalam pendekatan kebijakan. Misalnya, berfokus pada pendidikan perempuan dan partisipasi angkatan kerja sudah menjadi elemen penting dalam proses pembangunan di banyak negara sosialis.

Partisipasi angkatan kerja perempuan juga didorong dan difasilitasi oleh penyediaan layanan komunal di negara bagian, khususnya penyediaan layanan anak. Dalam beberapa kasus, dapur umum dan fasilitas mencuci telah disiapkan untuk memungkinkan beberapa wanita dibebaskan dari kendala tanggung jawab domestik. Memasukkan perempuan ke dalam angkatan kerja berbayar menjadi cita-cita sosialis tentang persamaan, dapat dilihat berkontribusi pada efisiensi yang lebih besar dalam sistem ekonomi dan oleh karena itu peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi (sangat mirip dengan pendekatan efisiensi Moser).

## **2. Feminisasi Kemiskinan**

Feminisasi Kemiskinan adalah “pertumbuhan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan secara bersama” (Moghadam, 2005). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat digambarkan secara umum bahwa kemiskinan lebih banyak diderita oleh perempuan. Todaro mengemukakan bahwa banyak perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, rendah kapasitas dalam mencetak pendapatan sendiri, serta terbatas kontrolnya terhadap

pendapatan suami (Todaro, 2000). Selain itu, perempuan juga memiliki keterbatasan akses dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak dalam sektor formal, tunjangan sosial dan program penciptaan lapangan pekerjaan yang diciptakan pemerintah. Jadi, semakin meningkatnya keterbelakangan perempuan bukan lantaran mereka tidak layak dan tidak mampu berpartisipasi dalam pembangunan, tapi karena perlakuan yang tidak adil, kerja yang mereka lakukan tidak dianggap sebagai kerja yang menghasilkan keuntungan.

Pengalaman perempuan dan laki-laki berbeda dalam kesenjangan dan ketidakberdayaan yang menyebabkan seseorang masuk dalam lingkaran kemiskinan. Ada 3 akar utama mengapa kemiskinan berwajah perempuan. Proses pemiskinan dimulai dari 3 aspek yang terkait dengan perempuan, yaitu ketika ia berada dalam ruang privat keluarga, adanya nilai tentang pembagian kerja secara seksual, dan globalisasi (Jurnal Perempuan, 2005).

Sumber dari permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan menurut Muhadjir terletak pada budaya patriarki yaitu nilai-nilai yang hidup dimasyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan subordinat (Muhadjir, 2005). Budaya patriarki seperti ini tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan dan sistem distribusi resources yang bias gender. Kultur yang demikian ini akhirnya akan bermuara pada terjadinya perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, eksploitasi maupun kekerasan terhadap perempuan.

Meskipun terdapat klaim yang menyatakan bahwa kemiskinan lebih banyak diderita oleh perempuan, dalam hal ini yaitu KRTP, namun ungkapan feminisasi kemiskinan menjadi dasar dari lahirnya gerakan-gerakan pengentasan

kemiskinan, yang mana tidak hanya mengurangi kemiskinan, melainkan juga mengurangi ketidaksetaraan gender.

Menurut *Williams dan Lee-Smith (2000; 1)*, feminisasi kemiskinan tidak hanya sekedar slogan, namun merupakan suatu panggilan yang mendorong kita untuk kembali mempertanyakan asumsi kita terhadap kemiskinan dengan menguji kembali apa yang menjadi penyebabnya, bagaimana membuktikan dan mengurangi, melalui perspektif gender.

Kebutuhan akan kesetaraan gender meningkat tidak hanya dalam kerangka analisis kemiskinan, melainkan juga dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini tidak dapat dihindarkan karena keterkaitan antara gender dan kemiskinan menawarkan suatu prospek yang sangat menggoda yaitu “dua burung dapat dibunuh dengan satu batu”, maksudnya adalah dalam proses pengurangan kemiskinan, kesetaraan gender juga dapat terwujud. Rodenberg (2004: iv) menggambarkan prospek ini sebagai “win-win formula” yang menghubungkan keadilan gender, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan yang lebih efektif. Namun upaya pengentasan feminisasi kemiskinan menemui banyak tantangan yang cukup signifikan.

Menurut Sylvia Chant, masalah-masalah terkait feminisasi kemiskinan antara lain yaitu :

- a. Rendahnya tingkat kesadaran perempuan



Selain dari permasalahan utama yaitu lemahnya data

**Kotak 4.1. Faktor penyebab feminisasi kemiskinan.**

Lima faktor yang berkontribusi terhadap feminisasi kemiskinan (Goldberg & Kremen, 1990).

**a. Pasar tenaga kerja**

Kondisi partisipasi perempuan angkatan kerja; pengangguran, pemisahan kerja, upah (sebenarnya gap tingkat dan upah gender), di bawah standar, kontingen, atau sulit bekerja dan tingkat kerja dan pengangguran.

**b. Pemerataan kebijakan**

Pengurangan ketidaksetaraan perempuan di pasar tenaga kerja melalui tindakan afirmatif, membayar ekuitas, dan anti diskriminasi serta hukum upah minimum dan manfaat kesejahteraan sosial seperti penitipan anak yang mengizinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja.

**c. Kesejahteraan sosial**

Bantuan pendapatan untuk mengkompensasi biaya keluarga dengan anak dan membesarkan anak melalui langkah-langkah seperti cuti orang tua dan tunjangan keluarga tunjangan; suplementasi upah rendah dan bentuk-bentuk bantuan sosial seperti subsidi untuk perumahan, makanan, dan kebutuhan lainnya; dan manfaat khusus untuk ibu tunggal seperti dijaminnya dukungan untuk anak.

**d. Demografi**

Ukuran perempuan populasi berisiko; status perkawinan ibu tunggal (janda, cerai / dipisahkan, tidak pernah menikah) minoritas ras, etnis, dan / atau status imigran.

kemiskinan berdasarkan jenis kelamin, perbedaan persepsi dan kesadaran di kalangan perempuan juga merupakan salah satu permasalahan pengentasan feminisasi kemiskinan.

Menghilangkan

kesenjangan antara kemampuan laki-laki dan perempuan juga menyulitkan pemahaman tentang bagaimana perempuan memiliki resiko yang lebih besar untuk menjadi miskin dibandingkan dengan laki-laki.

b. Penekanan yang berlebihan akan pendapatan

Hal-hal yang penting dalam menentukan posisi perempuan dalam dunia sosial ditandai dengan pembedaan yang legal, politis, kultural, dan

religius. Keadaan tersebut secara jelas mengindikasikan bahwa perempuan terlibat dalam kemiskinan entah

mereka memiliki pendapatan yang rendah atau tidak. Sebaliknya, ketidaksetaraan yang mereka terima umumnya tidak dijadikan dasar dalam penentuan indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan umumnya hanya disusun secara kuantitatif tanpa memperhatikan faktor-faktor lain yang tidak dapat diukur.

c. Penekanan yang berlebihan akan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP)

Feminisasi kemiskinan terlalu menekankan dan berpusat pada kepala rumah tangga perempuan, sebagaimana dalam pernyataan yaitu “feminisasi kemiskinan merupakan suatu proses dimana kemiskinan lebih terpusat pada individu-individu di dalam rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan” (Asgary and Paga'n, 2004: 97). Pernyataan ini merupakan paradoks terhadap penelitian-penelitian para feminis yang seringkali mengidentifikasi bahwa laki-laki adalah penyebab utama feminisasi kemiskinan di negara-negara berkembang. Namun, berdasarkan pernyataan Rodenberg, perempuan tidak mempermasalahkan menjadi kepala rumah tangga demi meningkatkan kesejahteraan dan untuk mendapatkan kendali penuh terhadap hidup mereka. Namun banyak juga perempuan yang ‘terpaksa’ dan tidak siap untuk menjadi kepala rumah tangga. Feminisasi kemiskinan tidak hanya berpusat pada KRTP saja, melainkan juga perempuan-perempuan lain yang mengalami ketidakadilan terhadap pemenuhan hak-haknya.

# **BAB V**

## **PROGRAM**

### **PENANGGULANAN**

#### **FEMINISASI KEMISKINAN**

##### **DI JAWA TIMUR**

Pada bab ini, penulis akan mendeskripsikan Program Penanggulangan Fемinisasi Kemiskinan di Jawa Timur untuk selanjutnya kita dapat menganalisis dan memahami penerapan konsep bisnis social, pembangunan inklusif juga pengembangan bisnis model kanvas di bab VI.

## 1. Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Jawa Timur

Berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945, penanganan kemiskinan adalah tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Untuk itu, Negara dituntut untuk hadir dan berkomitmen dalam upaya pengentasan kemiskinan, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat tercapai. Dalam upaya ini, indikator pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus diimbangi oleh penurunan angka kemiskinan dan disparitas serta kesenjangan (gap) semakin rendah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*) dan pengarusutamaan gender.

Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode 2014-2019, dimana Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” dan Misi “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”. Visi Misi tersebut merupakan kesinambungan dan sekaligus peningkatan dari visi sebelumnya yaitu “Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan Misi “Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”. Visi, Misi, serta Rencana Strategis yang dijanjikan oleh Pakde Karwo dan Gus Ipul sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur terpilih kepada Rakyat Jawa Timur tersebut menunjukkan konsistensinya terhadap komitmen keberpihakan kepada

masyarakat yang lemah dan belum beruntung yang di simbolkan dengan ikon “Wong Cilik.”

Berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dalam upaya untuk menumbuhkembangkan modal dasar capaian pembangunan pada periode pertama, maka pada pada periode kepemimpinan Pakde Karwo dan Gus Ipul 2014 – 2019 berkomitmen untuk meningkatkan dan memperluas Program Penanggulangan Kemiskinan yang diwujudkan melalui Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA).

Permasalahan kemiskinan secara keseluruhan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun secara khusus saat ini mencermati adanya peningkatan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan serta semakin tumbuh dan akutnya kondisi kemiskinan yang terjadi pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan. Fenomena yang sering dikenal sebagai feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang semakin berwajah perempuan tersebut memerlukan upaya khusus dalam rangka penanganannya.

Atas dasar permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merancang program untuk menangani kemiskinan perempuan, terutama bagi rumah tangga yang kepala rumah tangganya perempuan melalui Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan. Program ini tidak hanya sebagai upaya jangka pendek untuk memberikan bantuan kepada KRTP tetapi terlebih daripada itu adalah sebagai program yang berkelanjutan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (*poverty trap*) pada KRTP.

Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (selanjutnya disingkat PFK) merupakan program yang didesain khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan

program penanggulangan kemiskinan bagi rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga perempuan.

Tujuan dari program ini antara lain:

- a. Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap KRTP melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK sebagai mother care bagi KRTP.
- b. Memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan KRTP terhadap usaha produktif untuk peningkatan ekonomi/pendapatan keluarga.
- c. Membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.
- d. Mendorong motivasi berusaha (*need for achievement*) dan kemampuan (*life skill*) RTS dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

## **2. Ruang Lingkup Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan**

- a. Verifikasi data KRTP  
Verifikasi merupakan kegiatan pencermatan dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 terhadap kesesuaian kondisi riil KRTP di desa sasaran yang dilakukan dengan menggunakan metode rembug warga.
- b. Klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP  
Klarifikasi adalah pengecekan kondisi riil/faktual KRTP. Hasil verifikasi menggunakan metode observasi langsung. Identifikasi usulan kebutuhan KRTP adalah kegiatan untuk berdialog dan menjaring aspirasi mengenai jenis usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kegiatan ini sekaligus memfasilitasi KRTP untuk merumuskan dan mengajukan usulan kebutuhan kepada Gubernur Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Jenis usulan kebutuhan penanggulangan feminisasi kemiskinan diupayakan mendukung aktivitas sehari-hari yang telah dijalani kepala rumah tangga perempuan dan anggota rumah tangga produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Fasilitasi Bantuan KRTP

Bantuan KRTP berupa modal investasi dan atau modal kerja, bantuan usaha pendukung untuk mengurangi pengeluaran/belanja keluarga, serta kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup.

b. Peningkatan Kapasitas KRTP

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan KRTP dalam rangka mengembangkan usaha dari bantuan yang diterima sehingga bisa berkelanjutan. Kepala rumah tangga difasilitasi untuk membentuk kelompok dan diberikan bimbingan teknis serta pembinaan oleh tenaga pendamping maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dunia usaha, serta stakeholder terkait.

c. Pemberdayaan *Mother Care*

Pemberdayaan *mother care* dilakukan dengan cara memanfaatkan kader PKK desa sebagai pendamping desa kegiatan penanggulangan feminisasi kemiskinan. Kader PKK diharapkan adalah orang-orang yang paling faham dan dekat dengan kondisi KRTP, sehingga dengan didampingi kader, program ini diharapkan akan lebih optimal.

d. Pendampingan Program

Pendampingan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pengelola program, pembinaan realisasi usaha, dan pengelolaan bantuan kepada KRTP sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme, sistem serta prosedur yang ditentukan. Pendampingan dilakukan dengan menggunakan pendekatan mikro per rumah tangga serta

kelompok karena masing masing kepala rumah tangga memiliki karekeristik yang khusus tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga sosiokultural dan psikologis.

### 3. Lokasi Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Jawa Timur

Program PFK ini mulai dilaksanakan pada tahun 2014. Secara bertahap, hingga tahun 2017 ini, seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur telah menerima dan melaksanakan program tersebut, sedangkan untuk wilayah kota baru mulai dilaksanakan pada tahun 2018. Selama empat tahun pelaksanaan, program ini telah dirasakan oleh 53.585 KRTP dari target 76.283 KRTP pada tahun 2018 mendatang.

**Tabel 5.1 Daftar Lokasi Pelaksanaan Program PFK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017**

No	Nama Kabupaten	2014		2015		2016		2017	
		Desa	KRTP	Desa	KRTP	Desa	KRTP	Desa	KRTP
1	Pacitan	-	-	3	100	4	118	16	325
2	Ponorogo	-	-	5	160	5	137	18	645
3	Trenggalek	-	-	8	215	6	183	30	591
4	Tulungagung	4	114	7	168	4	100	42	1504
5	Blitar	-	-	21	676	20	840	24	393
6	Kediri	10	611	26	1655	23	692	36	1099
7	Malang	-	-	23	660	15	515	66	1999
8	Lumajang	-	-	8	253	13	352	18	332
9	Jember	4	177	21	592	6	144	36	1168
10	Banyuwangi	4	277	13	371	19	620	24	667
11	Bondowoso	-	-	1	20	4	50	29	762
12	Situbondo	4	287	5	169	10	240	26	423
13	Probolinggo	6	334	23	738	18	507	34	1994



14	Pasuruan	4	370	10	324	12	371	42	1790
15	Sidoarjo	-	-	11	267	16	416	29	883
16	Mojokerto	-	-	15	478	22	635	11	138
17	Jombang	-	-	20	469	19	587	17	421
18	Nganjuk	-	-	16	419	18	512	37	1814
19	Madiun	-	-	4	91	6	161	16	218
20	Magetan	-	-	11	354	8	230	19	259
21	Ngawi	8	315	13	372	18	530	27	485
22	Bojonegoro	6	338	8	220	11	317	23	606
23	Tuban	-	-	13	510	21	657	28	385
24	Lamongan	-	-	12	398	17	475	14	201
25	Gresik	-	-	25	989	22	745	23	896
26	Bangkalan	-	-	23	1147	8	556	31	1351
27	Sampan	-	-	33	1259	10	508	24	905
28	Pamekasan	4	486	13	705	10	327	17	721
29	Sumenep	-	-	25	789	8	303	28	905
	<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>3309</b>	<b>416</b>	<b>14568</b>	<b>373</b>	<b>11828</b>	<b>785</b>	<b>23880</b>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 2017

#### **4. Sasaran Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Jawa Timur**

Sasaran dari Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan ini mengacu pada Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015. Kriteria sasaran dari program ini yaitu:

- a. Rumah tangga dengan status kesejahteraan 10% terendah (desil 1) berdasarkan PBDT tahun 2015
- b. Rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan
- c. KRTP yang memiliki anggota rumah tangga produktif dengan usia antara 15-65 tahun atau kepala rumah tangga sebatang kara usia produktif
- d. Diprioritaskan dengan desa KRTP minimal 20 rumah tangga. Pada kabupaten dengan desa yang telah habis

kuota KRTP minimal 20 rumah tangga, dan atau desa dengan kuota KRTP minimal 20 rumah tangga sedikit, ditambah desa dengan kuota KRTP minimal 10 rumah tangga.

Kepala rumah tangga perempuan adalah seorang perempuan yang karena suatu hal menyebabkan dia menjalankan fungsi sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga. Hal-hal yang menyebabkan perempuan disebut sebagai KRTP antara lain:

- a. Telah bercerai
- b. Suami meninggal
- c. Ditinggal suami dalam waktu lama (minimal 6 bulan) dan tidak mendapatkan nafkah (diterlantarkan)
- d. Memiliki suami yang difabel/cacat dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas produksi
- e. KRTP sebatang kara usia produktif dan mampu mengelola usaha

Dalam pelaksanaan program PFK ini, tidak semua KRTP menerima bantuan. Beberapa KRTP digolongkan tidak layak menerima program ini dikarenakan mereka memenuhi kriteria berikut ini:

- a. KRTP yang dimaksudkan sudah menikah lagi
- b. Telah meninggal atau pindah
- c. Berdasarkan hasil rebug terbatas dianggap sudah memiliki status sosial ekonomi lebih baik, yang dituangkan dalam berita acara mengetahui Kades dan Pendamping desa terpilih
- d. Menolak bantuan
- e. Telah menerima bantuan program lain

Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 yang dijadikan acuan sasaran program pada tahun pelaksanaannya (2016) tidak bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan adanya beberapa

perubahan kondisi KRTP misalnya dari yang awalnya masih janda kini sudah menikah lagi dan dari yang awalnya kurang mampu kini sudah lebih baik perekonomiannya. Oleh karena itu, beberapa KRTP yang sudah masuk dalam PBDT 2015 dan menjadi sasaran program harus digantikan dengan KRTP lain yang lebih membutuhkan. Dalam menentukan kriteria pengganti KRTP yang tidak layak, dilakukan pada kegiatan rembug warga dengan ketentuan:

- a. Rumah tangga sasaran pengganti diprioritaskan berasal dari Data PBDT desil 1 yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan
- b. Apabila dari hasil pengecekan terhadap data desil 1 sudah tidak ditemukan rumah tangga sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka dapat memasukan rumah tangga diluar desil satu dengan syarat juga harus sesuai dengan kriteria rumah tangga sasaran sebagaimana ketentuan.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dijelaskan di atas, maka sasaran dari program PFK tahun 2016 ini adalah para KRTP yang berada di 373 desa di Jawa Timur yang mencapai 11.828 (Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, 2017).

# **BAB VI**

## **LESSON LEARNED**

### **PROGRAM**

#### **PENANGGULANGAN**

##### **FEMINISASI KEMISKINAN**

Setelah mendapatkan gambaran Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis akan menguraikan pembelajaran yang dapat kita ambil dari penerapan Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan. Pembelajaran dapat kita ambil melalui analisis pelaksanaan program berdasarkan uraian konsep social bisnis, pembangunan inklusif, dan feminisasi kemiskinan pada bab sebelumnya.

## 1. Praktik *Social Business* Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Jawa Timur

Kita telah memahami dan mempelajari pada bab dua bahwa bentuk *social business* sama dengan bentuk organisasi profit meskipun tujuan pengelolaannya tidak dimaksudkan semata-mata mencari keuntungan. *Social business* juga bukan merupakan organisasi nonprofit yang menjalankan amal. *Sosial business* juga merupakan organisasi profit. Seperti yang diuraikan oleh Muhammad Yunus, *social business* merupakan usaha yang memiliki misi untuk melayani masyarakat.

Konsep *social business* tersebut diterapkan pada Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Jawa Timur. Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Jawa Timur memiliki misi untuk melayani masyarakat. Bisnis yang dijalankan oleh para pelaku bisnis penerima Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan atau profit. Lebih dari itu, sesuai dengan tujuan terlaksananya program ini, Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan bertujuan untuk memberdayakan pelaku bisnis yaitu Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP), melalui:

- Pemberian akses interaksi dan perlindungan terhadap KRTP melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK sebagai mother care bagi KRTP.
- Perluasan akses Rumah Tangga Sasaran dengan KRTP terhadap usaha produktif untuk peningkatan ekonomi/pendapatan keluarga.
- Pemberian bantuan untuk mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.
- Pemberian dorongan motivasi berusaha (*need for achievement*) dan kemampuan (*life skill*) RTS dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;

## **2. *Inclusive Development* pada program Feminisasi Kemiskinan di Jawa Timur**

Kita juga telah memahami konsep *inclusive development* pada uraian bab tiga. Dalam hal mendefinisikan pembangunan inklusif, penulis lebih memilih untuk mengadopsi perspektif yang lebih luas dibanding hanya pengikutsertaan kelompok miskin atau yang termarginalkan. Perspektif ini dijelaskan oleh Arora dan Arora (2012:119) yang mendefinisikan pembangunan inklusif dalam konteks studi *governance*. yaitu:

Inklusivitas adalah suatu proses pembangunan social, dimana masyarakat harus bisa menjadi kelompok sasaran sekaligus *contributor*, secara tak terbatas pertumbuhan ekonomi adalah untuk, dari, dan oleh masyarakat bagaimanapun cara dan kapanpun waktunya; dalam konteks ini, kohesi dan integrasi sosial, serta pemberdayaan terjadi melalui suatu struktur tata pemerintahan atau *governance* yang terinstitusionalisasi.

Berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945, penanganan kemiskinan adalah tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Untuk itu, Negara dituntut untuk hadir dan berkomitmen dalam upaya pengentasan kemiskinan, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat tercapai. Dalam upaya ini, indikator pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus diimbangi oleh penurunan angka kemiskinan dan disparitas serta kesenjangan (gap) semakin rendah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*) dan pengarusutamaan gender.

Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode 2014-2019, dimana Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” dan Misi “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”. Visi Misi tersebut merupakan kesinambungan dan sekaligus peningkatan dari visi sebelumnya yaitu “Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan Misi “Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”. Visi, Misi, serta Rencana Strategis yang dijanjikan oleh Pakde Karwo dan Gus Ipul sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur terpilih kepada Rakyat Jawa Timur tersebut menunjukkan konsistensinya terhadap komitmen keberpihakan kepada masyarakat yang lemah dan belum beruntung yang di simbolkan dengan ikon “Wong Cilik.”

Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (selanjutnya disingkat PFK) merupakan program yang didesain khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan bagi rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga perempuan. Tujuan dari program ini antara lain:

1. Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap KRTP melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK sebagai mother care bagi KRTP.
2. Memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan KRTP terhadap usaha produktif untuk peningkatan ekonomi/ pendapatan keluarga.
3. Membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.
4. Mendorong motivasi berusaha (*need for achievement*) dan kemampuan (*life skill*) RTS dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;

Pada Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Jawa Timur, kita dapat melihat praktik penerapan *inclusive development*. Hal tersebut diindikasikan berdasarkan fakta yang ada bahwa berbagai pihak turut serta di dalam proses pelaksanaan Program Penanggulangan Feminisasi. Masyarakat tidak hanya menjadi sasaran program tetapi juga pelaksana untuk ikut berkontribusi. Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan merupakan program pemberdayaan yang secara sistematis terstruktur oleh tata pelaksanaan pemerintahan. Berdasarkan tata pelaksanaan pemerintahan, aktor yang terlibat diantaranya yaitu:

- a. Pemerintah: Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten memiliki peran sebagai pendamping program dan pemberi bantuan juga Pemerintah Desa sebagai pengawas dan pendamping Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan
- b. Masyarakat: terdiri dari KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sebagai pelaku bisnis sosial penerima Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, konsumen sebagai individu yang mengkonsumsi produk hasil usaha pelaku bisnis, distributor produk dan pengawas pelaksanaan program.
- c. Swasta: terdiri dari BUMDes dan pengusaha atau organisasi swasta lain yang bertugas sebagai mitra kunci untuk memberikan pasokan (*supply*) bahan baku atau sebagai distributor produk barang/jasa. Yang dihasilkan para pelaku bisnis sosial penerima bantuan Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Jawa Timur

### **3. Bisnis Model Kanvas Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Jawa Timur**

Banyak diantara bisnis kecil yang dilakukan pada penerima program bisnis dengan skala kecil belum

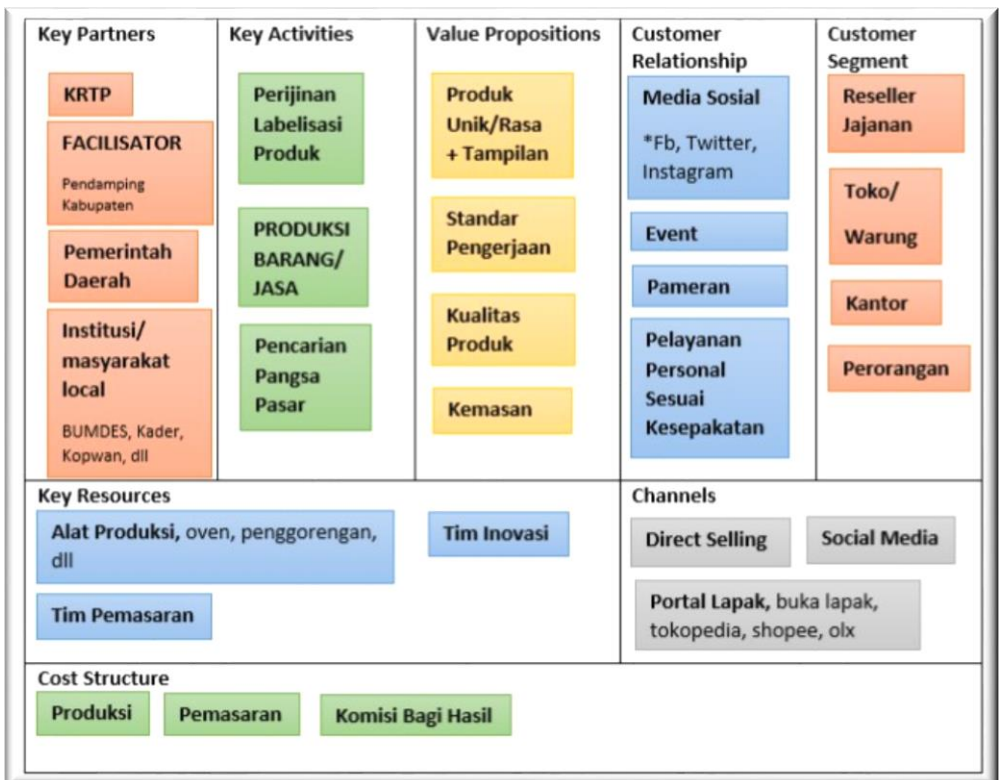


berkembang dan berkelanjutan, hal ini berdampak pada pemberdayaan dan secara lebih khusus peningkatan kesejahteraan kelompok sasaran. Model Bisnis social untuk mewujudkan pembangunan inklusif didasarkan pada harapan untuk meningkatkan pemberdayaan kepala rumah tangga perempuan.

Ini menjadikan kelompok yang termarginalkan oleh masyarakat dapat menjadi inklusif (turut serta) dalam proses pembangunan, juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Termasuk di dalamnya yang ikut serta pada proses pembangunan inclusive adalah BUMDess, Kopwan dan KUD.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab dua tentang social business sub bab tiga mengenai bisnis model kanvas. Kita dapat mengembangkan Bisnis model canvas yang dapat diterapkan pada Program PFK adalah sebagai berikut:

**Gambar 7.1. Bisnis Model Canvas untuk Program Pemberdayaan Feminisasi Kemiskinan**



Berdasarkan uraian bisnis model canvas yang digagas oleh Alexander Osterwalder, kita dapat mengidentifikasi sembilan elemen yang ada pada proses bisnis sosial Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Jawa Timur, yaitu sebagai berikut:

Terdapat sembilan elemen yang menjadi factor utama yang diidentifikasi apabila kita menjalankan sebuah bisnis, yaitu :

- a. *Customer segments*, yaitu objek yang diidentifikasi sebagai konsumen produk/jasa. Konsumen produk yang dihasilkan oleh pelaku bisnis sosial penerima Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan adalah *reseller* jajanan, warung, kantor, dan individu perorangan.
- b. *Value propositions*, yaitu nilai yang diterapkan pada produk/jasa, ini menjadikan mengapa produk/jasa yang kita hasilkan berbeda dengan yang lain. Proposisi nilai yang dimiliki oleh pelaku bisnis sosial penerima Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan adalah tampilan produk yang berbeda, kemasan, kualitas produk. Hal ini tidak terlepas dari program pendampingan dan pelatihan bagi para penerima program.
- c. *Channels*, yaitu media dalam menyalurkan produk/jasa juga termasuk media promosi dan penjualan. Para pelaku bisnis sosial penerima Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dapat menyalurkan produk yang dihasilkan melalui berbagai saluran *channels*, diantaranya: penjualan secara langsung, social media, dan portal lapak (buka lapak, tokopedia, shopee, dll)
- d. *Revenue streams*, yaitu arus pendanaan berasal dari mana, apakah hanya berasal dari profit atau sumber lain. Ini perlu untuk mengantisipasi pengeluaran tak terduga. Pelaku bisnis sosial penerima Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan selain memperoleh dana dari profit bisnis, modal didapat melalui dana khusus dari

pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten di tempat penerima bantuan tinggal sebesar Rp. 2.500.000,00. Bantuan dana yang diterima dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif meliputi modal investasi berupa sarana prasarana usaha modal kerja minimal 70%, kegiatan usaha pendukung misalnya pertanian karang kitri (rumah pangan lestari), usaha ternak kecil dan perikanan maksimal 30%. Dan apabila dipandang perlu pelaku bisnis mendapatkan sarana prasarana dan atau kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup maksimal 10% dari total bantuan KRTP.

**Gambar 7.2 Penyerahan Barang Bantuan Kepada KRTP**



Sumber: Dokumentasi penulis ketika sedang melakukan  
*research* 2016

- e. *Customer relationship*, yaitu melalui media apa kita dapat terhubung dengan *customer* atau konsumen. Pelaku bisnis sosial penerima Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan terhubung dengan konsumen atau *customer* melalui *Social Media*, event, pameran, pelayanan personal melalui kesepakatan.
- f. *Key resources*, yaitu sumber daya utama yang menjadi penyokong bisnis, contohnya, apabila kita bergerak di

bidang fashion maka designer merupakan *key resources*. Sumber daya utama pelaku bisnis sosial penerima Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan adalah alat produksi yang dimiliki, tim inovasi, dan tim pemasaran.

- g. *Key partnership*, dalam menjalankan bisnis kita memerlukan pihak lain untuk membantu baik dalam hal produksi maupun distribusi atau penjualan. Ini yang disebut sebagai mitra kunci. Mitra kunci Pelaku bisnis sosial penerima Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan adalah KRTP, Fasilitator (Pendamping Kabupaten), Pemerintah Daerah, institusi local seperti BUMDes. Para mitra kunci memiliki fungsi yang berbeda, tetapi yang terpenting adalah berkaitan dengan pendampingan pelaku bisnis hingga dapat berdiri secara mandiri juga termasuk di dalamnya memperkenalkan pelaku bisnis pada dunia pasar juga sebaliknya yaitu dunia pasar kepada pelaku bisnis, hal ini berkaitan dengan distribusi produk.

***Gambar 7.3 Musyawarah yang dilakukan oleh pelaku bisnis sosial dengan mitra kunci***



Sumber: Dokumentasi penulis ketika sedang melakukan  
*research* 2016

- h. *Cost structure*, yaitu sistem pembiayaan, uang atau dana yang dimiliki untuk dibelanjakan atau dianggarkan untuk apa. Sistem pembiayaan Pelaku bisnis sosial penerima Program Penanggulangan Feminsasi Kemiskinan dibelanjakan untuk produksi, pemasaran dan komisi bagi hasil dengan mitra bisnis.

# DAFTAR PUSTAKA

Arora, G., Kumar., and A. Arora. (2012). *Globalizing India: Need for Inclusive Sustainable Human Development*. International Journal of Sustainable Development 05(03): 115-128.

Badan Pusat Statistik. (2016). Badan Pusat Statistik : Jumlah Penduduk Misikin tahun 2013- 2015. [Online]

Available at: <http://bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119> [Accessed 28 4 2016].

Braga. (2014). *Motivations for social entrepreneurship --- Evidences from Portugal, Review of Applied Management Studies*, 12, 11-21

Certo, S., & Miller, T. (2008). *Social entrepreneurship: Key issues and concepts*. *Business Horizons*. 51, 267---271.

Chibba, M. (2008). *Perspectives on Inclusive Development*. *World Economics* 9(4): 145-156.

Dacin, P., Dacin, M., & Matear, M. (2010). *Social entrepreneurship: Why we don't need a new theory and how we move forward fromhere*. *Academy of Management Perspectives*, 38---57.

Defourny, J. dan Nyssens, M. (2012). *The EMES approach of social enterprise in a comparative perspective*. Seri Makalah Kerja EMES, WP no.12/03, Jaringan Penelitian Eropa EMES

- Esteva, G., Ed. (1992). *Development. The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*. London, Zed Books.
- Goldberg, G. Schaffner. (2010). *Poor Women in Rich Countries*. London: Oxford University Press.
- Grove, Andrea and Berg, Gary A. (2014). *Social Business: Theory, Practice, and Critical Perspectives*. Foreword by: Muhammad Yunus. New York, Dordrecht, London: Springer Heidelberg.
- Gupta, Joyeeta et al. (2015). *Toward and Elaborated Theory of Inclusive Development*. *European Journal of Development Research*. Vol.27, No.4, halaman 541-559.
- Indiresan, P. V. (2008). *Inclusive Development, Humanising SEZs by PURA. Paper Presented in Seminar on "Development Through Planning, Market, or Decentralization?"*. Department of Humanities and Social Science, Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai.
- Kanbur, R. and G. Rauniar (2010). *Conceptualizing Inclusive Development: With Applications to Rural Infrastructure and Development Assistance*. *Journal of the Asia Pacific Economy* 15(4): 437-454.
- Mader, P., 2015. *The Political Economy of Microfinance: Financialising Poverty*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Moghadam, V.M. 2005. *Globalizing women: Transnational feminist networks*. (Jakarta: Kompas)
- Muhadjir. 2005. *Negara dan Perempuan*. (Yogyakarta: Grha Guru

- Osterwalder, Alexander & Pigneur, Yves. (2013). *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers*. Willey Publisher.
- Pieterse, Jan Nederveen. (2014). *Development Theory: Deconstructions/Reconstructions. Second Edition*. London: Sage Publication.
- Prasetyantoko, A. et al. 2012. *PEMBANGUNAN INKLUSIF "Prospek dan Tantangan Indonesia"*. Jakarta: LP3ES.
- Rauniyar, G. and R. Kanbur (2010). *Inclusive Development: Conceptualization, Application and the ADB Perspective: Introduction*. Journal of the Asia Pacific Economy 15(4): 436-436.
- Steinerowski, A., Jack, S., & Farmer, J. (2008). *Who are the social entrepreneurs and what do they actually do? Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC)*. Frontiers of Entrepreneurship Research, 28(21). Article 2.
- Thompson, J. (2002). *The world of the social entrepreneur*. International Journal of Public Sector Management, 15(5), 412---431.
- TN2PK (2012) *Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial*. [www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id) [Accessed July 2012]
- TN2PK, n.d. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. [Online]
- Available at: <http://www.tnp2k.go.id/id/kebijakan-percepatan/strategi-percepatan-penanggulangan-kemiskinan/sekilas-strategi-percepatan/> [Accessed 28 4 2016].



- Todaro, Michael. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- UNDP (n.d.) '*Mobilize social business to accelerate achievement of Timor-Leste MDGs (2012-2015)*', Dokumen Proyek
- Willis, Katie. (2005). *Theories and Practices of Development*. London & New York: Routledge Taylor and Francis Group.
- World Bank. (2014). The World Bank. [Online] Available at: <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2014/09/23/new-poverty-frontier-in-indonesia-reduction-slows-inequality-rises>[Accessed 28 4 2016].
- World Bank. (2015). The World Bank : *Meluasnya Ketimpangan di Indonesia*. [Online] Available at: <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide>[Accessed 28 4 2016].
- World Bank (2008). *The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development*. The World Bank.
- Yunus, M., (2007). *Creating a World Without Poverty: Social Business and the future of Capitalism*. New York: Public Affair.
- Yunus, Muhammad, Bertrand Moingeon and Laurence Lehmann-Ortega. (2010). *Building Social Business Models: Lessons from the Grameen Experience*. Long Range Planning. 43: 308-325
- Yunus, Muhammad. (2008). *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan: Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupa Kita*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.

Available at: <http://www.grameen-info.org/history/>  
[Accessed 3 5 2016/ 9.05 AM]

The background of the cover is a dark, atmospheric photograph of a multi-story building at night. The sky is filled with heavy, dark clouds, and the building's facade is mostly in shadow, with some windows appearing as faint, dark rectangles. The overall tone is somber and contemplative.

## **BISNIS SOSIAL (SOCIAL BUSINESS) UNTUK PEMBANGUNAN INKLUSIF**

Penerbit by M-Brothers Indonesia Publisher  
ix, 86 hlm, Uk : 17 x 25 cm  
ISBN : 978 - 602 - 18950 - 8 - 5